

BAB II
**PROFIL *REPUBLIKA* SEBAGAI MEDIA ISLAM,
SEMIOTIKA *REPUBLIKA*, MANAJEMEN MEDIA *REPUBLIKA*,
DAN PANDANGAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

Republika sebagai surat kabar nasional yang besar telah tumbuh dan berkembang sejak era orde baru. Pendirian surat kabar ini banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor agama yang kental. Akan tetapi *Republika* bukanlah media Islam pertama yang lahir di Indonesia dan harian Islam bukanlah satu-satunya jenis surat kabar berlatar belakang agama di Indonesia. Umat Islam dulu memiliki surat kabar Abadi dan Pelita yang jauh lebih dulu terbit dibandingkan dengan *Republika*. Umat Kristen memiliki Sinar Harapan yang belakangan berubah nama menjadi Suara Pembaruan. Umat Katolik sementara itu memiliki *Kompas* yang saat ini menjadi salah satu harian terbesar di Indonesia¹.

Fenomena kemunculan media berlatar belakang agama dengan demikian merupakan hal yang umum di Indonesia. Bab ini mencermati sejarah pendirian *Republika* ditengah banyaknya media lain berafiliasi agama. Penjabaran akan sejarah ini menjadi penting untuk melakukan analisis karena menurut Ziauddin Sardar sejarah merupakan serangkaian peristiwa masa lampau, keseluruhan pengalaman manusia di mana sejarah sebagai suatu cara yang dengannya fakta di

¹ *Kompas* memang tidak pernah mengakui diri mereka sebagai harian umat Katolik dan lebih senang menempatkan diri mereka sebagai harian umum, akan tetapi latar belakang sejarah pendirian dan perkembangan mereka tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dan spirit Katolik, oleh karena itu terminologi “dimiliki umat Katolik” disini lebih dimaksudkan sebagai didirikan oleh umat Katolik.

seleksi, diubah-ubah, dijabarkan, dan di analisis² (Sardar, Ziauddin dalam Prasetyo, Banu. (20 Desember 2010). RUUK Yogya: Antara Data dan Fakta. *Suara Merdeka*: 6 Kolom: 3). Setelah itu bab ini juga akan membahas semiotika pemberitaan religio-politik *Republika* selama masa kampanye dan organisasi media tersebut. Terakhir juga akan disimak pandangan Islam mengenai politik sebagai dasar dari perilaku mereka dalam ruang politik Indonesia serta perbandingannya dengan agama lain, khususnya Nasrani.

1. *Republika* sebagai Media Islam

Kehadiran *Republika* sebagai harian dengan latar belakang agama tertentu bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan dengan banyak harian lain yang telah mapan di Indonesia *Republika* hanyalah anak kemarin sore yang belum memiliki banyak pengalaman. Berikut ini akan di bahas historisitas penerbitan berbagai harian dengan latar belakang agama di Indonesia sebelum *Republika* diterbitkan pada tahun 1993 dan latar belakang *Republika* sendiri sebagai harian umat yang hingga kini, 18 rahun, terus terbit mengarungi era Orde Baru dan Reformasi.

² Sardar juga mengemukakan konsep “data sejarah” dan “bukti sejarah” dimana menurut Patrick Gardiner data sejarah belum tentu sama dengan bukti sejarah. Konsep ini menggelitik penulis untuk berfikir bahwa data sejarah yang selama ini diperoleh untuk penelitian ini belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Penelusuran historis yang komprehensif dalam hal ini menjadi dibutuhkan, akan tetapi karena hal ini akan menjauhkan penelitian dari tujuan semula maka seluruh data yang diperoleh dalam penulisan Bab II ini penulis anggap sebagai kebenaran atau minimal sebagai frame mereka dalam memandang sejarah mereka sendiri.

2.1. Media Berafiliasi Agama sebelum *Republika*

Surat kabar di Indonesia telah terbit sejak tahun 1828 ditandai dengan terbitnya *Javasche Courant* di Jakarta. Harian ini bagaimanapun juga bukanlah koran berlatar belakang agama dan hanya memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, serta berita kutipan dari harian-harian Eropa³. Sementara itu menurut Abdurrachman Surjomihardjo dalam bukunya, "Sejarah Pers Indonesia", koran berbahasa Melayu pertama mulai terbit pada tahun 1971 di Padang dengan nama *Bintang Pertama*⁴. Harian inipun bukanlah harian berlatar belakang agama meskipun terbit di Padang dan keberadaannya pun sulit untuk di verifikasi karena kurangnya bukti (Anonim. *Surat Kabar Koran Pertama di Indonesia*. Dalam <http://pelaminanminang.com/sejarah-minangkabau/surat-kabar-Koran-pertama-di-indonesia.html#indonesia>. Di unduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.32 WIB). Media massa Islam pertama baru lahir pada tahun 1911 di Sumatera Barat dengan bentuk majalah bernama *Al-Munir*. Pendirian media massa ini sendiri dipelopori oleh Hadji Abdullah Ahmad dan bertujuan sebagai media dakwah bagi masyarakat Minang⁵. Majalah ini sayangnya tidaklah terlalu lama terbit sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi gerakan perpolitikan umat Islam di Indonesia.

³ Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. (2004). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Dalam <http://angelicus.wordpress.com/2008/09/24/sejarah-perkembangan-media-massa-di-indonesia-1/> Diunduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.30 WIB

⁴ Surjomihardjo, Abdurrachman. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: 360. Dalam <http://pelaminanminang.com/sejarah-minangkabau/surat-kabar-Koran-pertama-di-indonesia.html#indonesia>. Diunduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.30 WIB

⁵ Naldi, Hendra. (2008). *Booming" Surat Kabar Di Sumatra's Westkust*. Dalam http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Al-Munir%2C+Majalah+Islam+Pertama%3F&dn=20_110313192500. Diunduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.34 WIB)

Pada tahun 1947 terbit *Harian Abadi* yang secara jelas berafiliasi dengan partai politik Islam tertentu, yaitu Masyumi. Walaupun cenderung menjadi corong partai surat kabar ini terbit dengan tujuan yang cukup jelas, yaitu menyuarakan aspirasi umat Islam Indonesia yang sebagian besar saat itu berhimpun dalam Partai Masyumi. Surat kabar ini juga memiliki visi anti komunis dan seringkali berhadapan dengan surat kabar Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu *Harian Rakyat*. Pada tahun 1960 harian ini di tutup penerbitannya karena tak bersedia menandatangani ketentuan pemerintah berupa 19 persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Terbit (SIT). Ketentuan yang dikenakan pada semua surat kabar, majalah dan kantor berita itu antara lain mewajibkan mereka mendukung dan membela Manifesto Politik (Manipol), program pemerintah, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 45, Pancasila, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional, dan martabat negara. Pada tahun 1968 *Abadi* terbit kembali, namun pada tahun 1974, harian ini di breidel bersama tujuh surat kabar lainnya akibat pemberitaan peristiwa Malari (Anonim. *Harian Abadi*. Dalam <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/5>. Diunduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.33 WIB).

Pada tahun 1961 juga terbit harian berlatar belakang agama lain, yaitu *Sinar Harapan* yang dipelopori oleh umat Kristen Protestan. Harian yang terbit pada sore hari ini terbilang sukses dalam melewati masa ketegangan G30/S dan bahkan dapat menjadi salah satu harian besar di Indonesia. Pada tahun 1986 *Sinar Harapan* bertiras sekitar 220.000 eksemplar, atau merupakan surat kabar bertiras terbesar nomor empat di Indonesia setelah harian *Kompas*, *Pos Kota* dan *Sinar*

Pagi. Di lihat dari segi pengaruhnya harian ini juga di anggap sebagai surat kabar nasional paling berpengaruh nomor dua setelah harian pagi *Kompas*. *Sinar Harapan* juga merupakan penerima iklan terbesar kedua setelah harian *Kompas*, di antara surat-surat kabar yang terbit di Indonesia selama tahun 1982-1986 (Anonim. *Sinar Harapan*. Dalam <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2834/sinar+harapan>. Di unduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.34 WIB)

Akan tetapi pada bulan September 1986 *Sinar Harapan* dibreidel pemerintah orde baru karena salah satu beritanya di anggap mendahului pemerintah. Pada 4 Februari 1987 harian ini terbit kembali dengan nama baru, yaitu *Suara Pembaruan* dan terus terbit hingga saat ini. Itu pun dengan gaya pemberitaan yang agak berubah mesti tetap terbit sore hari (Sudibyo, 2001: 12).

Harian umat Nasrani lain yang tumbuh di Indonesia dalah Harian *Kompas*. Cikal bakal dari harian ini adalah majalah *Intisari* yang diterbitkan oleh PT Kinta yang didirikan oleh Auwjong Peng Koen atau lebih di kenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong (PK Ojong). PK Ojong sendiri adalah redaksi mingguan *Star Weekly*, bersama dengan Jakob Oetama yang menjadi wartawan mingguan *Penabur* milik Gereja Katolik mereka berdua akan menjadi perintis dari pendirian harian *Kompas*. Pada tahun 1964 Presiden Sukarno mendesak Partai Katolik untuk mendirikan koran, maka dari wartawan majalah *Intisari* inilah sebagian wartawan Katolik di rekrut. Atas permintaan dari Presiden *Sukarno* tersebut maka beberapa tokoh Katolik seperti PK Ojong, Jakob Oetama, dan Frans Xaverius Seda berkumpul bersama dengan berbagai organisasi Katolik seperti *Partai Katolik*, *Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia*, *Pemuda Katolik*,

dan *Wanita Katolik*, untuk mendirikan sebuah yayasan, yaitu *Yayasan Bentara Rakyat*. Kemudian dari yayasan inilah maka harian *Kompas* dilahirkan (Alam Sari, Gigih. *Sejarah Harian Kompas sebagai Pers Katolik*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095740/Sejarah-Harian-Kompas-Sebagai-Pers-Partai-Katolik>. Diunduh pada tanggal 25 November pukul 22:29 WIB. Hal 1-2).

Tidak jelas apa alasan dari Presiden *Sukarno* untuk meminta Partai Katolik mendirikan sebuah harian tersendiri. Akan tetapi tentu alasannya bukanlah religius atau berusaha menguntungkan kelompok Katolik, karena Sukarno tidaklah beragama Katolik serta, apabila di lihat dari *track record*-nya, sangat menjauhi berbagai hal yang dapat memecahkan bangsa Indonesia. Kemungkinan besar permintaan tersebut muncul karena Sukarno melihat bahwa umat Katolik belumlah memiliki harian tersendiri padahal umat beragama lain saat itu sudah memilikinya. Nama *Kompas* sendiri diberikan oleh Sukarno untuk menggantikan nama *Bentara Rakyat* yang sebelumnya telah disiapkan sebagai nama harian tersebut. Menurut bung Karno sendiri nama tersebut di pilih tak lain karena artinya sebagai penunjuk arah (Alam Sari, Gigih. *Sejarah Harian Kompas sebagai Pers Katolik*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095740/Sejarah-Harian-Kompas-Sebagai-Pers-Partai-Katolik>. Diunduh pada tanggal 25 November pukul 22:29 WIB. Hal 3). Hal ini tentu mengkoreksi berbagai isu yang berkembang bahwa nama *Kompas* adalah singkatan dari Komando Pastor, mengingat seluruh pendiri *Kompas* adalah umat beragama Katolik.

Harian ini sendiri nyaris tidak dapat terbit karena situasi politik nasional pada masa tersebut yang di dominasi oleh kontestifikasi kelompok Komunis, Nasionalis, dan Islamis. Menurut Frans Seda, Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu tahu akan rencana penerbitan ini dan berusaha untuk menjegalnya (Alam Sari, Gigih. *Sejarah Harian Kompas sebagai Pers Katolik*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095740/Sejarah-Harian-Kompas-Sebagai-Pers-Partai-Katolik>. Diunduh pada tanggal 25 November pukul 22:29 WIB. Hal 2), akan tetapi akhirnya rencana penerbitan tersebut dapat tetap berjalan karena di dukung langsung oleh Presiden Sukarno dan Jenderal Ahmad Yani. Menurut Frans Seda, Ahmad Yani saat itu meminta *Kompas* mampu memberikan wacana yang menandingi wacana PKI yang berkembang. Ahmad Yani sendiri adalah seorang perwira tinggi TNI yang beragama Islam, bersama dengan Jenderal Abdul Harris Nasution mereka berdua menjadi tokoh-tokoh TNI AD terkenal paling kritis terhadap PKI⁶. Akhirnya, setelah semua izin terpenuhi koran *Kompas* pun siap terbit untuk pertama kali. *Kompas* edisi pertama ini uniknya di cetak di PN Eka Grafika milik harian Abadi yang berafiliasi dengan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah partai berideologi Islamis yang kemudian dibubarkan oleh Bung Karno atas desakan PKI. *Kompas* lahir tepat pada tanggal 28 Juni 1965 dengan motto “*Amanat Hati Nurani Rakyat*”. Redaksinya pada saat itu tertulis antara: Pemimpin Redaksi Jacob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja,

⁶ AH Nasution dan Ahmad Yani adalah dua perwira tinggi TNI AD yang vocal terhadap dominasi PKI dalam pemerintahan, keduanya menentang berbagai kebijakan yang didorong oleh PKI seperti usulan mempersenjatai buruh dan tani. Keduanya juga menjadi incaran gerakan 30 S yang oleh beberapa kalangan diyakini disutradarai oleh PKI. AH Nasution berhasil lolos dari pembunuhan tersebut namun sebaliknya Ahmad Yani gugur

Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem. Nama PK Ojong tidak tercantum karena menurut Frans Seda pada saat itu ia tidak di sukai oleh Bung Karno.

Latar belakang pendirian harian ini memang banyak di warnai dengan perseteruan dengan PKI yang pada saat itu memang sangat kuat dan menjadi *common enemy* bagi seluruh umat beragama. Menurut Parera, Seda sendiri pernah mengemukakan bahwa *Kompas* mengikuti pemikiran *Fabian Society*⁷ ala Indonesia yang bermimpi membangun masyarakat sosialisme-demokrat anti komunis, karena menurutnya semiskin-miskinnya rakyat jelata mereka masih memiliki harta pribadi (Seda dalam Parera. (2007). *Kompas* Sebagai Lembaga Bisnis. *KOMPAS: Menulis dari Dalam*, 1).

Kompas mulai di pandang sebagai corong Katolik yang mendiskreditkan umat Muslim tatkala media-media Islam besar telah habis di berangus oleh Sukarno dan kemudian Suharto. Pada masa Orde Baru memang ada kecenderungan kebijakan untuk menjinakkan dan mendepolitisasi kelompok Islamis karena di anggap membahayakan kesatuan Republik Indonesia. Cara-caranya adalah dengan membubarkan dan menyatukan berbagai partai Partai Islam menjadi satu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, menetapkan asas tunggal Pancasila, memberangus berbagai media Islam, dan sebagainya. Karena kebijakan ini otomatis harian-harian besar yang berkuasa adalah harian kristiani seperti *Kompas* dan Sinar Harapan. Berbagai harian Kristiani ini sebenarnya juga

⁷ Fabian society adalah gerakan *civil society* di Inggris pada abad ke-19 yang dipimpin oleh para cendekiawan dan aktivis sosial prososialisme demokrat namun anti komunis. Menurut mereka sosialisme seharusnya sangat terkonsentrasi pada organisasi industri dan pemerataan kekayaan (Turner, 2006: 590).

tidaklah luput dari teror orde baru karena pada tahun 1978 *Kompas* dan Sinar Harapan juga di breidel karena mengkritisi pencalonan Suharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Saat itu terjadi aksi-aksi demonstrasi yang di motori oleh para mahasiswa UI yang terbukti gagal karena tidak di dukung oleh rakyat dan pemerintah. *Kompas* harus menjadi tumbal dan di breidel untuk kedua kalinya karena memberitakan perjuangan para mahasiswa tersebut. Dua minggu kemudian *Kompas* boleh terbit setelah Jakob Oetama, selaku pimpinan redaksi, meminta maaf kepada pemerintah dan berjanji untuk tidak mengulanginya (Mamak Sutamat dalam Parera. (2007). Dua Sosok Satu Jiwa. *KOMPAS: Menulis dari Dalam*, 100).

Peristiwa ini menandakan babak baru bagi perkembangan *Kompas* setelah sebelumnya penuh dengan idealisme menentang komunis kini mereka menjadi lebih pragmatis dan menurut pada pemerintah Orde Baru. PK Ojong sendiri berkata bahwa

“Manusia mesti mati. Meskipun begitu, kita sedih bila ada yang mati. Perusahaan tidak usah mati. Perusahaan bisa hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu kita lebih sedih lagi, bila suatu perusahaan mesti mati” (Mamak Sutamat dalam Parera. (2007). Dua Sosok Satu Jiwa. *KOMPAS: Menulis dari Dalam*, 100-102)

Kalimat ini menunjukkan pragmatisme *Kompas* dihadapan Orde Baru. Pragmatisme ini jugalah yang menyelamatkan mereka mengarungi seluruh sisa Orde Baru sementara media-media Islam lain tidak dapat melakukannya karena cenderung lebih militan dan “*bandel*”. Setelah dapat terbit kembali tiras *Kompas* terus meningkat hingga menjadi koran terbesar di Indonesia. Tercatat pada tahun 1999 oplahnya mencapai angka 600 ribu eksemplar sehari. Gramedia tercatat

sebagai pembayar pajak no 32 terbesar pada tahun 1980, dan pada tahun 1993 PT *Kompas* Media Nusantara diperkirakan menghasilkan Rp 240 Milyar setahun dengan laba bersih 30 – 35 Triliun⁸. Akan tetapi di balik kesuksesan ekonominya tersebut harian ini banyak di tuding diskriminatif terhadap umat Muslim dan cenderung hanya membela kepentingan umat Katolik saja. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemberitaan *Kompas* tidak berimbang, misalnya saat ada isu penerapan Perda Syariah *Kompas* hanya memuat tulisan orang yang menolak penerapan perda tersebut, lalu saat ada isu RUU Pornografi, *Kompas* juga hanya memuat tulisan orang yang menolak, dan saat ada isu Poligami, *Kompas* pun hanya memuat tulisan orang yang menolak Poligami⁹.

1.2. Kelahiran *Republika* dan Revivalisme Islam

Apabila dibandingkan dengan sejarah Harian *Kompas* maka *Republika* hanyalah koran yang baru terbit “kemarin sore”. Harian ini memang baru diterbitkan saat dekade akhir era orde baru atau tepatnya pada tanggal 4 Januari 1993. Terbitnya harian ini adalah puncak dari kebangkitan pers Islam yang sejak era orde baru terus di tekan dan di depolitisir. Paska kemerdekaan umat Muslim Indonesia memang memiliki berbagai harian yang cukup berpengaruh, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu seluruh harian tersebut lenyap karena tekanan pemerintah, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Sebelumnya telah dijelaskan

⁸ “Seperempat Abad om Pasikom”, Tempo, 30 juni 1990, hal. 80-81 dan “Tonggak Dunia Bisnis Nasional”, SWA , Agustus 1995 edisi khusus dalam Alam Sari, Gigih. *Sejarah Harian Kompas sebagai Pers Katolik*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095740/Sejarah-Harian-Kompas-Sebagai-Pers-Partai-Katolik>. Diunduh pada tanggal 25 November pukul 22:29 WIB. Hal 5-6

⁹ <http://www.mail-archive.com/media-dakwah@yahoogroups.com/msg09954.html>. Diunduh pada tanggal 25 November jam 22:21

bahwa pada tahun 1947 lahir *Harian Abadi* yang diterbitkan oleh Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah partai besar era Orde Lama yang menganut garis ideologi Islamis. *Harian* ini berkembang cukup baik sebagai suara umat Muslim hingga akhirnya di bredel pada tahun 1960 seiring dengan pembubaran Masyumi yang dianggap terlibat dengan peristiwa PRRI. *Harian* ini sempat terbit kembali pada tahun 1968 namun kembali mengalami pembredelan pada tahun 1974 karena peristiwa Malari.

Kemudian pada tahun 1974 terbit *Harian Pelita* yang dapat menjadi pers Islam alternatif setelah dibredelnya *Harian Abadi*. *Harian Pelita* bahkan pernah mencapai oplah di atas 200 ribu eksemplar pada kurun waktu antara 1977 dan 1982, sebuah prestasi yang bersejarah karena berhasil mengalahkan oplah *Kompas* walaupun hanya sementara. *Harian* ini pun tidak luput dari tekanan pemerintah dan telah mengalami berkali-kali pembredelan. Akhirnya karena tekanan yang terus menerus dari Golkar, partai pemerintah yang berkuasa saat itu, *Harian Pelita* pun jatuh ke pelukan pemerintah Orde Baru dan mengubah haluannya menjadi harian berideologi “*Islam Pembangunan*” (Alam Sari, Gigih. *Sejarah Berdirinya Pers Islamis dan Harian Republika*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095733/Sejarah-Beridirinya-Pers-Islamis-dan-Harian-Republika>. Diunduh pada tanggal 25 November jam 21:26 WIB. Hal. 1), sebuah terminology halus bagi kalangan umat Islam namun berarti kosong. Pada saat itu, pada tahun 1985, sepuluh pemimpin Golkar membeli 60% saham surat kabar ini. Termasuk di antaranya adalah Sarwono Kusumaatmadja dan Akbar Tandjung. Sejak tanggal 11 Maret 1986, Akbar Tandjung menjadi pemimpin redaksi *Harian Pelita* dan A.K. Jakobi sebagai

wakil pemimpin redaksi (Anonim. *Pelita*. Dalam <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2320/harian+pelita>. Diunduh pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 22.45 WIB).

Pada decade 1980an control pemerintah terhadap warganya memang mencapai titik tertinggi. Kelompok masyarakat Islam pada masa tersebut menjadi pihak yang paling di rugikan karena mereka praktis tidak lagi memiliki instrument media yang efektif untuk menyuarakan aspirasi mereka. Harian besar yang terbit pada masa itu praktis adalah berbagai harian dari kelompok agama yang berbeda, seperti *Kompas* dari umat Katolik dan *Sinar Harapan* dari umat Kristen. Fenomena ini menjadi sangat ironis mengingat Indonesia hingga saat ini adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, sangat aneh apabila mereka tidak memiliki sedikitpun media besar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Apa yang dilakukan pemerintah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Kalangan umat Islam di nilai terlalu berbahaya apabila menjadi “*cerdas*” dan terlalu “*politis*”. Peristiwa DI/TII menunjukkan bahwa apabila umat Muslim dibiarkan berkembang dan menjadi Islamis, maka mereka dapat mengancam penguasa, yaitu militer. Harian Katolik dan Kristen sementara itu di anggap lebih kompromistis dan lebih sesuai dengan sekuleritas negara, oleh karena itu mereka pun lebih di toleransi oleh pemerintah, walaupun hal ini tidak selalu benar karena *Kompas* dan *Sinar Harapan* juga tidak selalu luput dari pembredelan pemerintah.

Tekanan pemerintah terhadap pers dan intelektualitas Islam tersebut akhirnya mulai terbongkar dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kelahiran ICMI ini adalah dampak dari situasi global pada

awal 1990an di mana komunisme dan Uni Soviet runtuh dan muncul kebangkitan keagamaan Religious Revival di berbagai belahan dunia yang yang berimplikasi pada munculnya resistensi terhadap sekularisme dan berbagai produk buatan barat¹⁰. Seiring dengan kebangkitan tersebut maka muncullah berbagai organisasi Islamis yang memandang Islam sebagai ideologi peradaban dan alternatif bagi ideologi barat sekuler yang di anggap tidak Islami, ICMI dapat di anggap contoh dari kebangkitan organisasi-organisasi semacam ini.

Melalui ICMI lahirlah berbagai program yang bernafaskan Islam seperti Bank Muammalat, Asuransi Takaful, dan Harian *Republika*. Harian ini lahir berkat kegigihan para wartawan muda Islam yang di pimpin oleh Zaim Uchrowi untuk membentuk pers Islam. Setelah berbagai upaya gagal karena tekanan Orde Baru mereka pun memperoleh kesempatan tersebut melalui ICMI yang dapat menembus pembatas ketat pemerintah untuk izin penerbitan. *Republika* kemudian dilahirkan dengan pengelola PT Abdi Bangsa yang sahamnya mayoritas di kuasai oleh tokoh-tokoh ICMI seperti Erick Tohir, BJ Habibie, dan Adi Sasono.

Latar belakang pendirian harian ini yang sangat dekat dengan gerakan revivalisme Islam dengan mudah membuat setiap orang mengidentifikasi *Republika* sebagai pers berbasis politik aliran, yaitu terhadap umat Islam. Hal ini juga di perkuat dengan kenyataan bahwa mayoritas saham PT Abdi Bangsa, pengelola dari *Republika*, adalah tokoh ICMI, organisasi yang di nilai sangat

¹⁰ Deliar Noor. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES. Hal 99-105. Dalam Alam Sari, Gigih. *Sejarah Berdirinya Pers Islamis dan Harian Republika*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095733/Sejarah-Beridirinya-Pers-Islamis-dan-Harian-Republika>. Diunduh pada tanggal 25 November jam 21:26 WIB

terkait dengan Revivalisme Islam. Bahkan menurut David T. Hill¹¹ *Republika* di bangun setelah ICMI mengidentifikasi musuh bersama, yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang dengan sengaja menutup-nutupi kegiatan Islam secara profesional¹². Pernyataan tersebut tentu sensasional karena seolah-olah *Republika* di bangun semata-mata untuk meruntuhkan hegemoni “kelompok minoritas” Katolik dan Kristen yang selama ini di nilai telah menghadirkan pemberitaan yang berat sebelah dan mengkerdikan umat Islam.

Tujuan pendirian *Republika* juga dilandasi oleh kebutuhan yang mendesak dari kaum Muslim untuk memiliki media tersendiri, hal ini sebenarnya wajar karena umat Islam Indonesia saat itu memang tidak memiliki media tersendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam buku *Republika 17 Tahun Melintasi Zaman* dikatakan bahwa umat Islam rindu terhadap koran bernapaskan Islam, berwibawa, dan bisa menjadi referensi bagi umat Islam. Umat Islam juga dikatakan gelisah karena saat itu informasi justru di kuasai oleh koran non-Muslim. Ada perasaan bahwa umat Islam sebagai mayoritas justru di kuasai oleh umat beragama lain yang minoritas. Opini publik yang berkembang pun kebanyakan hanya satu arah dan itu seringkali merugikan umat Islam (Utomo, 2010: 11 dan 12).

¹¹ David T. Hill adalah Professor Studi Asia Tenggara dari Universitas Murdoch yang banyak meneliti isu-isu politik, media, dan budaya di Indonesia. Buku-bukunya antara lain *The Press in New Order Indonesia, Journalism and the Media in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis, Media, Culture, and Poilitc in Indonesia* (bersama dengan Krishna Sen), dll.

¹² David T. Hill. (1995). *The Press in Order Indonesia 2nd*. Terjemahan, Jakarta. PT. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 126. Dalam Alam Sari, Gigih. *Sejarah Berdirinya Pers Islamis dan Harian Republika*. Dalam <http://www.scribd.com/doc/4095733/Sejarah-Beridirinya-Pers-Islamis-dan-Harian-Republika>. Diunduh pada tanggal 25 November jam 21:26 WIB

Visi pendirian *Republika* ini menjadi dasar pemikiran bahwa *Republika* adalah salah satu alat umat Islam untuk berkontestifikasi dalam ruang media dengan harian besar non Islam lain. *Republika* dan ICMI sementara itu juga di nilai bukanlah organisasi yang fundamentalis. Tokoh-tokoh ICMI seperti BJ Habibie tentu telah di kenal luas sebagai cendekiawan Islam yang moderat. Kelahiran *Republika* dengan demikian bukanlah sesuatu hal yang luar biasa atau buruk, malahan kelahirannya mampu memberikan khasanah yang lebih luas bagi pertumbuhan pers di Indonesia. Sayangnya, seperti halnya dengan *Kompas*, banyak kalangan yang menilai bahwa pemberitaan di *Republika* berat sebelah serta hanya menjadi media pembela umat Muslim. Pemberitaan konflik Timur Tengah, kerusuhan beragama di Poso dan Ambon, serta pemberitaan konflik lain yang melibatkan umat Islam menunjukkan ketidakberimbangan yang besar pada pemberitaan *Republika*.

2. Analisis Semiotika Pemberitaan Religio-Politik *Republika*

Penelitian ini menggunakan proses Analisis *Gatekeeping* sebagai teknik analisis utama, akan tetapi sebelumnya akan dilakukan analisis teks semiotika menurut Saussure untuk memperoleh informasi yang mungkin dapat melengkapi dan mendukung. Pada analisis ini data yang di cari adalah data-data berupa teks, dalam hal ini teks pemberitaan Harian *Republika* yang mengandung unsur-unsur berita Religio-Politik. Teks berita tersebut kemudian akan di analisis menurut analisis semiotika dari Saussure. Ada beberapa isu religio-politik yang muncul

dalam pemberitaan *Republika* semasa musim kampanye 2009 lalu. Secara garis besar isu-isu tersebut meliputi:

- a. Isu Kampanye Jilbab. Isu tersebut diberitakan oleh *Republika* pada tanggal 1 Juni 2009 dengan judul “*JK: Jangan Suruh Istri Saya Lepas Jilbab*”.
- b. Isu Istri Boediono Nasrani. Isu tersebut mulai diberitakan oleh *Republika* pada tanggal 25 Juni 2009 dengan judul “*Istri Boediono Diserang*”. Kemudian di susul dengan pemberitaan pada tanggal 26 Juni 2009 dengan judul “*Kasus Herawati Boediono di-Bawaslu-kaní*.”
- c. Isu Kebijakan Syariah. Isu tersebut paling terlihat pada pemberitaan *Republika* tanggal 9 Juni 2009 dengan judul “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”. Isu ini juga terlihat pada pemberitaan tanggal 27 Juni 2009 dengan judul “*SBY: Peran Islam Penting*” dan tanggal 28 Juni dengan judul “*Muhammadiyah Memberi Panduan Memilih Presiden*”.

Berbagai pemberitaan dalam kelima isu tersebut akan di kupas secara lebih mendalam melalui analisis semiotika menurut Saussure yang terbagi dalam analisis struktur sintagmatik dan struktur paradigmatic. Struktur sintagmatik sendiri adalah hubungan di mana seluruh tanda dikonstruksikan dalam satu rangkaian atau kombinasi yang dapat diartikan (Sebeok, 2001: 7). Analisis struktur sintagmatik sendiri berarti menginterpretasikan makna dari rangkaian kalimat, gambar, dan tanda-tanda lain yang terdapat dalam teks penelitian. Analisis paradigmatic sementara itu mencoba untuk memahami struktur paradigmatic dalam teks. struktur paradigmatic sendiri adalah hubungan di mana

beberapa fitur minim dalam tanda cukup untuk membedakan tanda tersebut dari berbagai tanda lain yang sejenis (Sebeok, 2001: 7). Analisis dalam struktur ini akan mencoba memahami pemilihan tanda-tanda tertentu dalam teks seperti frasa, kutipan, atau gambar lalu memahami arti dari tanda yang di pilih dan bagaimana tanda tersebut mempengaruhi seluruh arti dari teks.

2.1. Analisis Semiotika Teks Berita “JK: Jangan Suruh Istri Saya Lepas Jilbab”

Pemberitaan ini terbit pada tanggal 1 Juni 2009 pada halaman delapan kolom enam harian *Republika*. Berita ini di pilih karena di anggap memiliki nilai religio-politik yang kental di mana isu yang di bahas adalah seputar politisasi simbol keagamaan tertentu, jilbab, dalam kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.

2.1.1. Analisis Sintagmatik

Pemberitaan ini memuat tanggapan Jusuf Kalla sebagai salah satu calon presiden terhadap pernyataan ketua DPP Partai Demokrat *Anas Urbaningrum* yang meminta tidak ada politisasi agama dalam kampanye, serta terhadap pernyataan *Susilo Bambang Yudhoyono* (SBY) yang meminta tim kampanyenya untuk tidak menggunakan symbol agama dan SARA. Jusuf Kalla kemudian dituliskan menanggapi kedua pernyataan tersebut dengan mengecam dan mempertanyakan tudingan politisasi agama. Menurutnya tudingan itu berbahaya karena dapat dimaknai meminta istrinya, Mufida Kalla, dan istri calon wakil presidennya, *Uga*

Wiranto, untuk melepas jilbab mereka agar tidak ada kesan melakukan politisasi agama.

2.1.2. Analisis Paradigmatik

Pada pemberitaan ini Jusuf Kalla direpresentasikan sebagai individu yang keras dan tegas dengan mengecam dan mempertanyakan balik pernyataan dua petinggi Demokrat mengenai politisasi agama. Tidak hanya sampai disitu, Jusuf Kalla pun digambarkan tegas membela prinsip-prinsipnya terutama terkait dengan perintah agama Islam, hal ini terlihat dari dimuatnya paparan Jusuf Kalla mengenai perintah agama Islam bagi perempuan untuk menutup aurat. Gambaran ini terlihat dari kutipan Jusuf Kalla yang di pilih oleh *Republika* untuk ditampilkan dalam pemberitaan mereka, kutipan tersebut berkata:

“Dipaparkannya, persoalan jilbab yang dikenakan istrinya adalah persoalan pribadi. Terlebih agama Islam memerintahkan perempuan menutup aurat. “masak istri saya dan Pak Wiranto dibilang salah (mengenakan jilbab – red),” kata JK”

Tulisan tersebut seolah-olah merepresentasikan Jusuf Kalla sebagai pembela agama di mana dia dengan tegas menentang ide yang bersinggungan dengan keyakinannya sebagai umat Islam. Lebih lanjut *Republika* juga memuat pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa isu ini adalah fitnah, bahwa pilihan menggunakan jilbab adalah urusan pribadi, bukan karena masalah politik, dan oleh karena itu isu ini adalah fitnah. Yuddy Chrisnandi selaku juru bicara tim kampanye nasional JK-Win kemudian juga menegaskan dengan mengatakan:

“Kalau ada elemen masyarakat yang kemudian memberi apresiasi kepada mereka, itu bukan salah mereka. Masyarakat punya hak memberi penilaian atas ketaatan seseorang dalam beragama”

Kata-kata *Yuddy* yang di muat oleh *Republika* tersebut dengan jelas merujuk Mufida Kalla dan *Uga Wiranto* sebagai sosok yang taat beragama karena keduanya sama-sama menggunakan jilbab. Ucapan ini juga seirama dengan pernyataan JK yang menyebutnya sebagai perintah agama. Seluruh pernyataan tersebut, yang di muat oleh *Republika*, semakin mempertegas posisi Jusuf Kalla sebagai pembela prinsip-prinsip Islam yang kokoh.

Pemilihan kutipan tersebut seolah-olah menjadi “cara” *Republika* mengkritisi isu kampanye jilbab yang berkembang selama masa kampanye. Sebagai harian Islam dengan audiens dan pekerja media mayoritas Muslim mungkin mereka juga turut tersinggung dan risih melihat bagaimana penggunaan jilbab seseorang menjadi permasalahan tatkala dikaitkan dengan politik. Tidak heran karena penggunaan jilbab menurut Islam adalah kewajiban yang diperuntukan bagi setiap muslimah dewasa, sehingga tidak pantas dan etis apabila dikaitkan dengan urusan politik. Pemilihan kutipan *Yuddy* juga seolah-olah menjadi suara *Republika* yang ingin berkata bahwa jilbab adalah tanda kealiman seorang muslimah, tidak ada urusannya dengan politik.

Tabel 1

Tabel Analisis Teks Berita “*JK: Jangan Suruh Istri Saya Lepas Jilbab*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Pernyataan Jusuf Kalla	Sikap tegas Jusuf Kalla yang menolak isu kampanye jilbab seraya membela penggunaan

	jilbab istrinya karena perintah agama
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Kutipan Kalla	Merepresentasikan Jusuf Kalla sebagai pembela agama di mana dia dengan tegas menentang ide yang bersinggungan dengan keyakinannya sebagai umat Islam
Kutipan Yuddy	Menunjukkan kesalahan Mufida Kalla dan Uga Wiranto karena telah mengenakan jilbab

2.2. Analisis Semiotika Teks Berita “*Istri Boediono Diserang*”

Dua analisis berita berikut akan menganalisis teks terkait dengan isu istri Boediono non-Muslim. Istri ini muncul di akhir bulan Juni yang juga merupakan masa akhir kampanye calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2009. Pada saat itu beredar selebaran gelap yang dianggap memojokkan pasangan SBY-Boediono dalam kampanye JK-Wiranto. Isi selebaran tersebut menginformasikan bahwa istri Boediono, Herawati, adalah seorang penganut agama Katolik. Kasus ini menjadi panas karena Demokrat menganggap tim JK-Wiranto melancarkan kampanye negatif, sedangkan tim JK-Wiranto juga meradang karena menganggap selebaran tersebut adalah penyusupan yang bertujuan merugikan tim mereka. Berita pertama yang dianalisis di sini adalah berita *Republika* pada tanggal 25 Juni 2009 halaman lima kolom satu yang berjudul “*Istri Boediono Diserang*”.

2.2.1. Analisis Sintagmatik

Pada teks berita ini *Republika* lebih banyak memberitakan kronologis peristiwa penyebaran selebaran gelap tersebut. *Republika* menulis bahwa selebaran gelap tersebut tidak hanya beredar saat diselenggarakannya kampanye dialogis antara Jusuf Kalla dan tokoh Muslim di Asrama Haji Jl H Nasution, Medan, selebaran yang sama juga beredar di Mranggen Jawa Tengah khususnya saat capres Jusuf Kalla berdialog di Ponpes Fuluhiyah. *Republika* juga membeberkan bahwa selebaran tersebut adalah fotokopi dari tabloid Indonesia Monitor yang mengutip kata-kata Habib Husein al-Habsy yang mengatakan bahwa istri Boediono bukanlah Muslimah. *Republika* juga menulis pernyataan dua tokoh tim kampanye, yaitu Rizal Mallarangeng dari tim SBY-Boediono yang meminta tim JK-Wiranto mengklarifikasi selebaran tersebut, serta dari tim JK-Wiranto yang menegaskan bahwa selebaran tersebut tidak datang dari tim kampanye JK-Wiranto.

2.2.2. Analisis Paradigmatik

Menarik untuk di simak bahwa *Republika* terlihat sangat berhati-hati dalam menuliskan berita tersebut. berbeda dengan yang terjadi di layar televisi, *Republika* tidak menjadikannya sebagai isu utama atau berita utama, melainkan hanya menempatkan berita tersebut dalam kolom pemilu dengan porsi berita yang sedikit. Berita ini dengan demikian nampak direpresentasikan sebagai berita yang umum, tidak sensasional, dan tidak perlu mendapat sorotan lebih. Berikutnya *Republika* juga dengan bijak tidak menampilkan agama yang di-isukan di anut oleh Herawati. *Republika* dengan jelas menuliskannya sebagai “*Bukan beragama*

Islam”. *Republika* dengan demikian berhasil untuk tidak merepresentasikan agama non-Islam apapun dalam isu tersebut.

Judul berita yang di pilih sementara itu dapat berbicara lain. Frasa “*Istri Boediono Diserang*” tampaknya memang berbicara secara harfiah bahwa keyakinan dari istri Boediono di politisir sedemikian rupa oleh oknum-oknum tertentu, akan tetapi frasa ini juga dapat diartikan bahwa istri Boediono diposisikan dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena di isukan bukan seorang muslimah, artinya dengan menjadi non-Muslim seseorang berada dalam posisi yang sangat buruk kala ingin mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, atau bahkan istri wakil presiden. Alih-alih meredakan suasana yang telah panas, *Republika* malah melestarikan pandangan stereotipis bahwa yang dapat duduk sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia hanyalah kaum Muslim. Ini adalah representasi *Republika* terhadap isu tersebut.

Representasi lain yang menarik untuk di lihat adalah bagaimana *Republika* menempatkan Habib Husein al-Habsy . *Republika*, dalam teks pemberitaannya, tampak tidak menggali terlalu dalam mengenai tokoh tersebut, padahal tokoh inilah yang pertama kali mengatakan bahwa istri Boediono adalah seorang non-Muslim. Relasi yang dimunculkan dalam teks juga kebanyakan mempertentangkan antara tim kampanye JK-Wiranto yang diwakili oleh komentar dari Yuddy Chrisnandi dan tim kampanye SBY-Boediono yang diwakili oleh komentar dari Rizal Mallarangeng. Tidak jelas relasi yang ingin dibangun dengan Habib Husein al-Habsy atau mungkin Tabloid *Indonesia Monitor*, karena *Republika* sama sekali tidak menampilkan tanggapan dari kedua pihak tersebut.

Melalui teks tersebut Habib Husein al-Habsy menjadi relatif lebih bebas dari kesalahan karena teks lebih menitik beratkan pada pertentangan antara dua tim kampanye, apabila ada yang disalahkan maka mungkin pihak *oknum yang tidak dikenal*¹³-ah yang akan terkena.

Tabel 2

Tabel Analisis Teks Berita “*Istri Boediono Diserang*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Keseluruhan Berita	Adanya selebaran negatif yang beredar selama Jusuf Kalla melakukan kampanye di berbagai daerah. Selebaran ini menyerang pribadi istri Boediono yang disukan sebagai non Muslim
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Frasa diserang	Memberikan kesan stereotipis bahwa menjadi non-Muslim dalam dunia politik di Indonesia sangatlah tidak menguntungkan
Frasa bukan beragama Islam	Memberikan kesan netral yang berhati-hati

¹³ Menjadi oknum yang tidak dikenal karena tim kampanye JK membantah bahwa selebaran tersebut berasal dari mereka, hingga logikanya ada oknum tak dikenal yang berada diluar tim JK-Win yang menyebarkan selebaran tersebut

2.3. Analisis Semiotika Teks Berita “Kasus Herawati Boediono di-Bawaslu-kan”

Berita kedua terkait dengan isu istri Boediono non-Muslim muncul pada harian *Republika* sehari setelah berita pertama mengenai isu ini keluar. Berita tersebut muncul pada tanggal 26 Juni 2009 dengan judul, “Kasus Herawati Boediono di-Bawaslu-kan”.

2.3.1. Analisis Sintagmatik

Pemberitaan ini mengikuti perkembangan kasus Herawati Boediono dimana Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono diberitakan melaporkan kasus tersebut pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara umum *Republika* memberikan porsi yang lebih besar pada pemberitaan ini dibandingkan pada pemberitaan yang pertama. Hal ini terlihat dari penggunaan font judul yang lebih besar dan porsi dua kolom yang lebih banyak ketimbang berita pertama yang hanya ditulis dalam satu kolom. Walaupun belum dijadikan sebagai Head News langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa *Republika* berupaya untuk merepresentasikan isu tersebut secara lebih serius. *Republika* juga tampil lebih berani dengan secara jelas menunjuk agama yang diisukan dianut oleh Herawati Boediono, yaitu Katolik. Penyebutan ini memang hanya kalimat tidak langsung dari Yuddy Chrisnandi yang kemudian dimuat oleh *Republika*, akan tetapi hal ini tetap menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk menghadirkan umat Katolik dalam isu tersebut.

2.3.2. Analisis Paradigmatik

Perbedaan pemilihan frasa yang paling terlihat dibandingkan berita sebelumnya adalah frasa Katolik yang telah dimunculkan menggantikan frasa non-Muslim. Pemilihan frasa ini membuat audiens dengan mudah mengasosiasikan agama tertentu dalam konteks pemberitaan. Pemilihan itu juga secara tidak langsung membawa pemberitaan pada isu pertentangan lama antara Islam dan nasrani atau dalam hal ini Katolik. Pemilihan tanda ini juga potensial melakukan eksklusi terhadap umat Katolik, karena dengan menjadi Katolik maka Herawati mendapat permasalahan, oleh karena itu masyarakat disini pastilah bukan umat Katolik karena masyarakat tidak mau mendapatkan masalah.

Pemilihan tanda lain yang menarik dari pemberitaan ini adalah ucapan Yuddy Chrisnandi lainnya mengenai Herawati Boediono, *Republika* menulis dan mengutip:

“jika pihak SBY merasa dirugikan dengan berita bahwa Herawati Boediono beragama Katolik, sebaiknya dibuktikan saja. “Undang media dan ibu Herawati membaca surat Al Fatihah, selesai perkaranya,” Saran Yuddy.”

Kalimat yang tampak keras dan tidak bijaksana tersebut memang keluar dari mulut Yuddy Chrisnandi, akan tetapi *Republika* pun memiliki andil karena mengutipnya, terlebih *Republika* memasukkannya dalam sub berita berjudul Al Fatihah. Dalam kalimat tersebut tampak jelas bahwa isu tersebut direpresentasikan sebagai isu agama yang dapat dengan mudah diselesaikan melalui cara-cara religius juga, yaitu menyuruh Herawati Boediono untuk membaca Al Fatihah untuk membuktikan ke Islamannya. Menariknya *Yuddy* kemudian melanjutkan

pernyataannya dengan kalimat yang lebih menyejukkan, *Republika* menulis dan mengutip:

“Dipaparkannya, semestinya berita Herawati beragama Katolik tidak perlu membuat kubu SBY-Boediono gerah, “Kita itu hidup dalam Negara Pancasila yang menghargai keragaman. Jadi, agama yang dianut ibu Herawati mestinya tidak menjadi masalah.”

Kalimat ini terdengar menyejukkan dibanding kalimat yang pertama, walaupun tidak begitu kontekstual mengingat isu tersebut dipermasalahkan karena agama Herawati Boediono dipolitisir. Kalimat ini secara umum merepresentasikan isu tersebut secara berbeda, dimana isu agama Herawati Boediono dianggap tidak perlu dipermasalahkan karena asas Pancasila dan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Frame *Republika* dalam membungkus pesan yang “*Pancasilais*” ini juga cukup netral dengan tidak terjebak untuk membungkusnya secara negatif atau positif.

Argumen lain yang bisa dikemukakan adalah identitas penulisan melakukan eksklusivitas terhadap umat Katolik, karena umat Katolik disini secara jelas telah disebut sebagai agama yang diisukan dianut oleh Herawati Boediono, dan celakanya dengan menjadi Katolik maka Herawati mendapat permasalahan, oleh karena itu masyarakat disini pastilah bukan umat Katolik karena masyarakat tidak mau mendapatkan masalah. Masyarakat disini pastilah umat yang dengan membaca surat Al Fatimah maka segala permasalahan menjadi beres, yaitu umat Islam.

Tabel 3

Tabel Analisis Teks Berita “*Kasus Herawati Boediono di-Bawaslu-kan*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Berita utama	Mengikuti perkembangan dari tim kampanye SBY-Boediono yang berniat melaporkan isu kampanye negatif istri Boediono non-Muslim pada Bawaslu
Sub berita al-fatihah	Kasus istri Boediono tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dengan cara menyuruh Herawati Boediono untuk membaca surat al-Fatihah
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Frasa Katolik	Pemilihan frasa ini dengan segera membuat keseluruhan isu menjadi lebih kultural dengan mempertemukan pertentangan klasik Islam-Nasrani
Kutipan Al-Fatihah	Pemilihan kutipan tersebut membuat isu politik yang ada lebih bergeser menjadi isu agama dimana solusi yang paling mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan solusi agama
Kutipan Pancasila	Pemilihan kutipan ini sedikit meredakan situasi panas karena kutipan al-Fatihah dengan mengembalikan permasalahan ke spirit nasional kebangsaan yang multikultural

2.4. Analisis Semiotika Teks Berita “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”

Selain isu istri Boediono dan kampanye jilbab, isu religio-politik lain yang sering muncul dalam pemberitaan *Republika* selama masa kampanye adalah isu kebijakan syariah. Isu-isu kebijakan syariah disini adalah berbagai isu atau wacana kebijakan penerapan syariah Islam yang muncul selama masa kampanye presiden. Wacana kebijakan penerapan syariah Islam tidak mesti berarti wacana untuk menjadikan Indonesia Negara Islam seperti dalam konsep MMI, HTI, atau JI¹⁴. Wacana syariah Islam disini dapat berarti dalam lingkup yang lebih kecil dimana khasanah peraturan dalam Islam diaplikasikan secara parsial dalam system-sistem peraturan Negara. Tiga analisis semiotika terakhir akan mengkaji tiga pemberitaan yang termasuk dalam isu tersebut. Pemberitaan pertama yang akan dikaji disini adalah pemberitaan *Republika* pada tanggal 9 Juni 2009 halaman satu kolom dua dengan judul “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”.

2.4.1. Analisis Sintagmatik

Berita dengan judul, “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”, mengemukakan wacana yang dilontarkan oleh cawapres yang diusung Partai Demokrat, Boediono, saat berdiskusi dengan redaksi *Republika*. Ia mengatakan bahwa system ekonomi syariah memiliki potensi bagi Indonesia untuk keluar dari krisis keuangan global yang pada saat itu tengah mendera dunia. Pernyataan tersebut kemudian diikuti

¹⁴ Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi Islam yang berupaya menerapkan syariat Islam secara utuh bagi masyarakat Islam. Walaupun sama-sama mengancam demokrasi dan sistem sekuler MMI masih beranggapan bahwa penerapan tersebut dapat dilakukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, HTI dilain pihak menganggap bahwa penerapan tersebut hanya dapat diterapkan melalui terciptanya kekhalifahan Islam di dunia. Jamaah Islamiyah (JI) sementara itu memiliki filosofi berfikir yang sama, akan tetapi mereka menggunakan metode yang jauh lebih keras dan radikal

dengan berbagai argumen akademis seperti keunggulan ekonomi syariah karena berasaskan pada sektor riil, bagi hasil, dan lain-lain. Selanjutnya ia juga menyatakan keyakinan bahwa ekonomi syariah dapat bersaing dengan ekonomi konvensional. Berita pun ditutup dengan pernyataan dari dua tokoh lain, yaitu pengamat ekonomi syariah, Adiwarmanto Azwar Karim, dan Kepala Divisi Syariah BII, Chairil A. Azis. Keduanya memberikan pernyataan yang semakin memperkuat argumen akademis dari Boediono tersebut.

2.4.2. Analisis Paradigmatik

Menarik untuk memahami representasi seperti apa yang hendak ditampilkan oleh *Republika* terkait wacana ini. Berita tersebut menjadi Headline News atau berita utama dari harian *Republika* pada edisi tanggal 9 Juni 2009. Selaku berita utama font judul yang diberikan pun tentu besar dan jelas. Foto yang terpampang pada halaman tersebut juga besar dan berwarna, menampilkan Boediono yang tengah berbicara serius dengan redaksi *Republika*. Seluruh bagian tersebut tentu ditujukan untuk menarik perhatian audiens, menandakan betapa pentingnya wacana tersebut bagi *Republika*. Pemilihan wacana tersebut sebagai berita utama tentu juga menjadi pertanyaan yang menarik, karena mungkin ada banyak materi kampanye lain yang juga layak menjadi berita utama, akan tetapi *Republika* justru memilih sebuah wacana abstrak mengenai penerapan ekonomi syariah yang belum tentu akan diterapkan saat SBY-Boediono berkuasa. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa *Republika* berusaha merepresentasikan wacana tersebut

sebagai hal yang sangat penting bagi audiens, terutama dimasa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

Republika juga menuliskan judul yang cukup persuasif dan optimis, “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”. Frasa kalimat ini, terutama dengan adanya kata serius didalamnya, seakan-akan menunjukkan bahwa Boediono, selaku calon wakil presiden dari SBY, akan secara serius menerapkan Ekonomi Syariah apabila ia berkuasa kelak. Hal ini menjadi cukup ironis karena saat menelusuri pemberitaan didalamnya maka dapat dengan mudah ditemukan bahwa penerapan ekonomi syariah yang dimaksud oleh Boediono sifatnya hanyalah incremental seperti penguatan UKM dan perbankan syariah, dan tidak menyeluruh. Disini *Republika* telah melakukan suatu kaidah jurnalistik yang disebut sebagai sensasionalisme atau bombastisme dengan mengeluarkan judul yang seakan-akan ekonomi syariah akan diterapkan secara menyeluruh oleh Boediono. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa *Republika* merasa isu tersebut penting dan harus segera diketahui oleh khalayak.

Kemudian *Republika* juga memilih Headline betulkan “Boediono nilai ekonomi syariah prosektor riil.” Melalui headline tersebut *Republika* terlihat ingin merepresentasikan ekonomi syariah sebagai system yang sangat membela sektor riil¹⁵. Tokoh Boediono sendiri selain dikenal sebagai calon wakil presiden juga telah dikenal luas sebagai seorang akademisi dan professor ekonomi dari UGM. *Republika* juga merepresentasikannya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Prerekonomian, sehingga apa yang

¹⁵ Sektor riil adalah kegiatan ekonomi yang bergerak dalam bidang-bidang produksi dan perdagangan barang dan jasa.

diucapkannya dalam konteks ekonomi pastilah memiliki dasar yang kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Boediono mengatakan ekonomi syariah prosektor riil pastilah hal itu benar adanya karena Boediono adalah seseorang yang sangat kredibel dalam bidang perekonomian. Selain itu *Republika* juga mengutip beberapa pernyataan Boediono, antara lain:

“Dibandingkan system ekonomi konvensional, Boediono mengakui transaksi dalam system ekonomi syariah dilandasi pada kegiatan perekonomian yang konkret. Ini tentu berbeda dengan system konvensional yang boleh mendasarkan aktivitasnya pada transaksi derivatif”

“Konsep ekonomi syariah pun tak mengenal kesenjangan antara sektor riil dan financial. Bila di ekonomi konvensional dua sektor ini bisa berjalan tak seiring, di ekonomi syariah ada jembatan berupa bagi hasil atau sewa.”

“Seringkali terjadi dana hanya berputar-putar di system keuangan derivative, tanpa turun ke sektor riil. Ini tidak terjadi di ekonomi syariah karena konsep bagi hasil itu”

Dari tiga kutipan tersebut terlihat bahwa *Republika* terlihat tertarik untuk menekankan pada perbandingan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Image yang bisa diperoleh dari ketiga kutipan diatas adalah bahwa ekonomi syariah lebih unggul dari system ekonomi konvensional karena lebih konkret dan riil. Apabila dilihat konteks waktunya pada saat itu dimana krisis ekonomi dunia tengah terjadi maka image yang diperoleh bisa semakin positif, karena pada saat itu system kredit yang menjadi salah satu dasar system ekonomi konvensional sedang dipersalahkan atas terjadinya krisis ekonomi dunia¹⁶. Image ini juga

¹⁶ Krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 dimulai dari adanya kredit macet perumahan berskala nasional di Amerika Serikat. Kredit macet ini terjadi karena pengembang-pengembang perumahan di Amerika Serikat berusaha mendapatkan pembeli sebanyak mungkin melalui sistem kredit pada keluarga kelas menengah kebawah. Saat barang-barang murah dari Cina membanjiri pasar Amerika Serikat, banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga mengakibatkan banyaknya keluarga kelas ini yang menganggur. Hasilnya mereka pun tidak bisa membayar cicilan rumah dan terjadilah bubble economy dimana terdapat banyak barang yang terjual

diperkokoh dengan dua pernyataan penutup dari dua tokoh ekonomi, yaitu Adiwarman Azwar Karim dan Chairil A. Azis. Adiwarman menegaskan bahwa ekonomi syariah mestinya menjadi opsi serius dalam system perekonomian di tanah air, sedangkan Chairil menegaskan bahwa adanya larangan melakukan transaksi derivative menunjukkan system ekonomi syariah layak menjadi pilihan.

Seluruh kutipan tersebut menunjukkan bahwa *Republika* tidak hanya ingin merepresentasikan ekonomi syariah sebagai ekonomi prosektor riil, *Republika* juga ingin menunjukkan bahwa system ekonomi ini lebih unggul dari system ekonomi konvensional dan dapat menjadi penyelamat untuk keluar dari krisis ekonomi dunia. Representasi Boediono sebagai cawapres yang sedang berkampanye bahkan tidak terlihat karena *Republika* lebih menyibukkan diri untuk mengutip argumen-argumennya mengenai ekonomi syariah, hingga Boediono terlihat seperti pengamat ekonomi yang tengah berdiskusi.

Sementara itu pihak-pihak yang muncul dalam teks tersebut antara lain Boediono, Redaksi *Republika*, Adiwarman Azwar Karim, dan Chairil A. Azis. Relasi yang terjadi diantara mereka secara keseluruhan adalah relasi yang saling mendukung. Dukungan *Republika* terhadap pernyataan Boediono terlihat dari foto berita tersebut yang memperlihatkan awak redaksi *Republika* tersenyum lepas saat tengah memperhatikan Boediono berbicara. Dukungan *Adiwarman* dan *Chairil* terhadap Boediono juga terlihat dari teks pemberitaan mereka yang mendukung apa yang diucapkan oleh Boediono. Tidak ada satupun kutipan dari tokoh-tokoh lain yang mengimbangi atau menentang pernyataan dari Boediono sehingga

namun hanya sedikit uang yang berputar. Sistem kredit dalam ekonomi konvensional inilah yang kemudian disalahkan atas terjadinya krisis ekonomi tersebut.

atmosfer relasinya adalah saling dukung. Secara lebih luas pihak-pihak muncul dalam teks tersebut juga dapat dilihat sebagai dua kelompok, kelompok pertama adalah penganut ekonomi syariah, yaitu Boediono, *Republika*, Adiwarmanto Azwar Karim, dan Chairil A. Azis, dan kelompok kedua adalah ekonomi konvensional yang tidak diwakili oleh siapapun namun selalu muncul dalam perbandingan yang dilakukan oleh Boediono. Relasi di antara keduanya dengan jelas menunjukkan sifat saling saling tentang dan saling menegasikan, dengan ekonomi syariah selalu menjadi yang lebih baik karena sektor riil, dan ekonomi konvensional selalu menjadi “*the bad guy*” karena tidak sektor riil dan menyebabkan krisis ekonomi dunia.

Identitas yang diperlihatkan oleh teks tersebut tampak ingin membawa audiens untuk ikut menjadi pendukung ekonomi syariah, tidak hanya karena seluruh tokoh yang dihadirkan mendukung ekonomi syariah, namun juga atmosfer yang di bangun bahwa ekonomi konvensional adalah system yang bobrok dan menyebabkan krisis ekonomi dunia sehingga jalan yang terbaik adalah system ekonomi syariah. Pembaca di bawa pada pengandaian bahwa istilah-istilah sektor riil, ekonomi non derivative, dan lain-lain adalah konsep-konsep yang positif. Seolah-olah dengan membaca berita tersebut pembaca di bawa pada alam pikiran wartawan untuk ikut antusias mendukung wacana ekonomi dari Boediono.

Tabel 4

Tabel Analisis Teks Berita “*Ekonomi Syariah Opsi Serius*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Berita secara umum	Isu yang sangat penting bagi audiens bankan cenderung sensasional sehingga layak ditempatkan sebagai berita utama
Boediono	Tidak terlalu digambarkan sebagai cawapres yang tengah berkampanye, namun lebih seperti pengamat ekonomi yang tengah berdiskusi
Ekonomi Syariah	Sangat positif, system yang sangat membela sektor riil, lebih unggul dari system ekonomi konvensional, dan dapat menjadi penyelamat untuk keluar dari krisis ekonomi dunia
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Frasa Sektor Riil dan Derivatif	Memberikan argumen yang rasional dan intelek untuk mendukung sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang paling baik
Frasa mantan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Prerekonomian	Membawa Boediono lebih sebagai pengamat ekonomi dengan pengalaman yang mumpuni di bidang perekonomian dan keuangan daripada sebagai calon wakil presiden
Kutipan dua pengamat ekonomi lain	Mempertegas keunggulan sistem ekonomi syariah dan membawa berita lebih kepada berita ekonomi daripada berita mengenai calon wakil presiden yang sedang berkampanye

Gambar Boediono yang sedang “berceramah” dan senyum redaksi <i>Republika</i>	Dengan jelas menunjukkan dukungan <i>Republika</i> terhadap segala yang diutarakan oleh Boediono, yaitu pernyataannya mengenai kebaikan sistem ekonomi syariah
--	--

2.5. Analisis Semiotika Teks Berita “SBY: Peran Islam Penting”

Isu kebijakan syariah juga terlihat pada pemberitaan *Republika* tanggal 27 Juni 2009 halaman satu kolom satu dengan judul “SBY: Peran Islam Penting”.

2.5.1. Analisis Sintagmatik

Pada pemberitaan ini *Republika* mengulas pernyataan SBY di sela kunjungannya ke kantor *Republika* mengenai pentingnya peran Islam. *Republika* mengutip pernyataan SBY bahwa peran Indonesia sangat penting untuk mengikis stigma negatif terhadap Islam. Ia mengatakan bahwa Islam, demokrasi, dan modernitas dapat hidup berdampingan di Indonesia oleh karena itu Indonesia dapat menjadi model islam yang menyejukkan bagi masyarakat internasional. Pemberitaan ini memang tidak memiliki isu kebijakan syariah yang jelas, akan tetapi konsep-konsep modernitas dan demokrasi yang dipadukan dengan Islam di sini dapat menjadi pintu masuk karena konsep syariah Islam juga sering dibenturkan dengan konsep demokrasi yang cenderung sekuler.

2.5.2. Analisis Paradigmatik

Judul berita tersebut, “*SBY: Perang Islam Penting*”, di tulis dengan font yang besar dan diletakkan sebagai berita utama di halaman pertama. Hal ini menunjukkan bahwa *Republika* memandang serius wacana SBY tersebut dan ingin merepresentasikan wacana berita ini sebagai sesuatu hal yang juga penting bagi masyarakat. Penelusuran sekilas atas judul dan gambar berita yang menunjukkan SBY beserta tim kampanye dan redaksi *Republika* tengah berdoa setelah selesai shalat, dapat menimbulkan image bahwa *Republika* tengah melakukan sensasionalisme lagi terkait dengan Islam dan betapa pentingnya agama ini. Akan tetapi saat menelusuri berita tersebut secara keseluruhan maka dapat ditemukan intonasi dan nada yang lebih menyejukkan.

Republika memilih headline, “*Islam, demokrasi, dan modernitas bisa berdampingan*”. Headline tersebut memang merangkum keseluruhan isi dari berita, karena berita tersebut melulu mengutip perkataan SBY mengenai bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan baik dengan demokrasi di Indonesia dan bahwa Indonesia dapat menjadi model bagi Islam yang ramah, *Republika* menulis:

“*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan peran Indonesia sangat penting dalam mengikis stigma negative dan buruk terhadap Islam. Sebab, selain merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar, Negara lain pun telah menjadikan Indonesia sebagai contoh.*”

““*Islam, demokrasi, modernitas, bisa hidup berdampingan di Indonesia,*”. Kata SBY saat berkunjung ke Harian Umum *Republika*”

“*SBY menegaskan Indonesia memiliki potensi untuk melakukan banyak hal untuk Islam secara internasional. Apalagi, negara-negara lain pun sedang mencari model Islam yang menyejukkan. Bila bisa tampil secara tepat, baik, dan kontributif, SBY menyatakan posisi Indonesia akan terhormat.*”

Rangkaian teks tersebut menunjukkan banyak hal yang menarik untuk di analisis. Pertama, *Republika* memuat konsep bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan dengan baik. Konsep ini di muat tanpa diberikan frasa-frasa yang negative menjurus kearah penolakan, pandangan yang berseberangan dengan wacana ini juga tidak diberikan di mana berita tersebut melulu adalah kata-kata dari SBY. Kedua, *Republika* juga menghadirkan dirinya sebagai harian umum, yang arti harfiahnya dalam dunia jurnalistik adalah bahwa harian ini bukanlah media simpatisan kelompok manapun. Kedua hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa *Republika* berupaya untuk merepresentasikan Islam sebagai agama yang toleran dan dapat beradaptasi dengan demokrasi, terutama di Indonesia. Dan *Republika* tidak hanya berupaya mengatakan hal tersebut pada umat Islam saja, namun juga kepada umat beraga lain, karena mereka adalah harian umum.

Hal menarik lain yang dapat di peroleh di sini adalah suatu ketidaksegaran *Republika* untuk memuat perkataan SBY bahwa Islam memang memiliki stigma yang negatif dan buruk. Kutipan ini tidak dibarengi dengan frasa-frasa negatif yang meng-*counter* perkataan SBY, sehingga dapat *Republika* dapat dikatakan relatif menyetujui perkataan SBY tersebut. Hal ini juga menegaskan positioning *Republika* sebagai harian umum, karena dalam media simpatisan Islam sulit untuk menemukan sikap yang menyetujui wacana-wacana seperti di atas¹⁷

¹⁷ Penulis sebelumnya telah melakukan penelitian tekstual terhadap media simpatisan Islam, Sabili, dan penulis memang merasakan resistensi yang luar biasa dari media semacam ini untuk menerima bahwa Islam memiliki stigma yang negatif, kelompok yang radikal, dll. Biasanya penolakan mereka dituangkan dengan *counter* dalam berita. Wacana fanatisme Islam misalnya di balas dengan tulisan bahwa fanatik artinya adalah percaya secara berlebihan atau teramat sangat, dan umat Islam justru sebaliknya harus bersikap fanatik seperti demikian

Pihak-pihak yang muncul dalam berita ini dapat dirumuskan menjadi beberapa relasi, yang pertama adalah relasi antara *Republika* yang menyokong perkataan pihak lain, yaitu SBY. Sokongan ini terlihat dari tidak adanya argumen atau tokoh penyeimbang lain yang dikutip oleh *Republika*. Sokongan ini juga terlihat dari gambar berita yang menunjukkan SBY tengah shalat dan berdoa bersama dengan redaksi *Republika*, bagai menunjukkan sebuah aliansi spiritual dalam gambar. Berita ini juga dapat memunculkan relasi antara masyarakat Indonesia, yang diwakili oleh SBY, dengan dunia Islam secara utuh, terhadap dunia barat. Relasi di antara ketiga pihak ini adalah bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia Islam yang ikut terkena stigma negative namun memiliki potensi untuk menyelamatkan image dunia Islam itu sendiri, sementara itu dunia barat adalah dunia yang memberikan stigma negative terhadap Islam namun harus segera di “didik” untuk memahami Islam yang sesungguhnya melalui Indonesia. Hubungan antara Islam dan barat dengan demikian bukanlah hubungan pertentangan, namun hubungan kikuk yang di dasari oleh kesalahpahaman.

Identitas yang di bangun secara jelas menempatkan masyarakat dan wartawan sebagai bagian dari masyarakat Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari frasa-frasa seperti negara lain yang menunjuk pada Amerika Serikat atau dunia barat secara keseluruhan. Identitas yang di bangun juga menunjuk hanya pada masyarakat Indonesia, bukan dunia Islam secara utuh, karena berita ini juga menggunakan frasa negara lain pada negara-negara islam non Indonesia yang dikatakan menjadikan Indonesia sebagai contoh. Secara keseluruhan berita tersebut sangat di dominasi oleh pernyataan SBY mengenai Islam dan Indonesia,

sehingga audiens pun bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari Islam dan Indonesia.

Tabel 5
Tabel Analisis Teks Berita “*SBY: Peran Islam Penting*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Berita secara umum	memandang serius isu tersebut dan ingin merepresentasikan wacana berita ini sebagai sesuatu hal yang juga penting bagi masyarakat
Islam	Islam memang memiliki stigma yang negatif dan buruk akan tetapi Islam adalah agama yang toleran dan dapat beradaptasi dengan demokrasi, terutama di Indonesia
SBY	Digambarkan secara positif sebagai muslim yang santun dan peduli terhadap kondisi dunia Islam saat ini
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Judul SBY: Peran Islam Penting	Dengan tegas menunjukkan keinginan <i>Republika</i> untuk menonjokan peran penting Islam dalam dunia politik
Kutipan kalimat Islam, demokrasi, dan modernitas bisa berdampingan	Berusaha menginformasikan bahwa Islam tidaklah kuno, kolot, atau tertinggal, melainkan selaras dengan nilai-nilai modern
Frasa Harian Umum	Seolah-olah menyingkir dari peran <i>Republika</i> selama ini sebagai harian Islam,

	sehingga dengan demikian penilaian positif Islam dalam berita tersebut dapat di promosikan sebagai penilaian dari media yang umum, bukan partisan
--	---

2.6. Analisis Semiotika Teks Berita “*Muhammadiyah Memberi Panduan Memilih Presiden*”

Berita terakhir adalah berita *Republika* pada tanggal 28 Juni 2009 halaman dua kolom dua dengan judul “*Muhammadiyah Memberi Panduan Memilih Presiden*”. Berita ini sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas menampakkan kebijakan syariah dibandingkan dengan berita pertama dan kedua.

2.6.1. Analisis Sintagmatik

Berita ini berisi mengenai panduan yang diberikan oleh Muhammadiyah untuk memilih presiden. Muhammadiyah, melalui ketuanya Dien Syamsudin, dilaporkan telah merumuskan sembilan kriteria yang dapat diikuti oleh warga Muhammadiyah dalam memilih presiden dan wakil presiden. Tidak seluruh kriteria tersebut di muat oleh *Republika* dan hanya satu, dari semua yang di muat *Republika*, yang memiliki unsur kebijakan syariah. *Republika* menulis dan mengutip kriteria tersebut sebagai berikut:

“Maklumat terakhir yaitu figure harus akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, khususnya aspirasi Muhammadiyah. Pengalaman lima tahun terakhir, kata Dien, menunjukkan hampir tak ada satupun aspirasi Muhammadiyah yang diakomodasi pemerintah. “Tentu Muhammadiyah berharap presiden dan wakil presiden mendatang bisa akomodatif terhadap Muhammadiyah,” tandas Dien.”

Kalimat berita ini menjadi kunci untuk memahami isu kebijakan syariah yang terdapat didalamnya. Teks tersebut merepresentasikan umat Islam dan khususnya Muhammadiyah sebagai pihak yang termarginalisasi, terabaikan dan ditinggalkan oleh pemerintah.

2.6.2. Analisis Paradigmatik

Pemilihan kutipan tersebut secara implisit memunculkan pandangan bahwa kaum Muslim menjadi umat terbesar di Indonesia namun aspirasinya tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah, bagaikan menjadi tuan rumah namun tak memiliki kuasa di negeri sendiri. Pandangan ini adalah sikap yang sering muncul pada kelompok Islamis¹⁸ di mana mereka merasa aspirasi umat Islam selalu tidak dihiraukan karena kebijakan-kebijakan yang syar'i atau Islami jarang dilaksanakan oleh pemerintah. Pandangan ini akan didiskusikan secara lebih lanjut di bab V, untuk saat ini cukuplah dikatakan bahwa representasi yang ingin di bangun *Republika* dengan mengutip kalimat tersebut adalah bahwa aspirasi syar'i umat Islam, dan secara khusus Muhammadiyah, telah lama diabaikan oleh pemerintah.

¹⁸ Kelompok Islamis adalah kelompok Islam Politik yang spectrum politiknya condong kearah kelompok fundamentalis. Nama lain yang sering digunakan untuk menyebut kelompok ini adalah kelompok Islam Politik, Fundamentalis Islam, Islam Radikal, Islam Transnasional, Skriptualis, dll.

Tabel 6

Tabel Analisis Teks Berita “*Muhammadiyah Beri Panduan Memilih Presiden*”

Sintagmatik	
Rangkaian Tanda	Arti Rangkaian
Umat Islam dan Muhammadiyah	Kaum yang terabaikan karena aspirasi syar’i mereka telah lama diabaikan oleh pemerintah
Paradigmatik	
Pilihan Tanda	Konsekuensi Pilihan
Kutipan terakhir Din Syamsudin	Seolah-olah menunjukkan bahwa umat Muhammadiyah khususnya dan Islam umumnya selama ini tidak di dengar aspirasinya. Apabila dicermati maka aspirasi tersebut terkait dengan berbagai kebijakan syariah yang selama ini di dorong oleh <i>Republika</i> , seperti ekonomi syariah, RUU Makanan Halal, dll. Padahal telah banyak kebijakan pemerintah yang mengakomodasi syariah seperti UU APP, Sisdiknas, dll.

3. Manajemen Organisasi Harian *Republika*

Seperti halnya media lain, harian *Republika* memiliki komposisi redaksional yang tidak jauh berbeda. Redaksional harian ini dipimpin oleh Pimpinan Redaksi, akan tetapi dalam kesehariannya redaksi lebih sering dipegang langsung oleh Redaktur Pelaksana yang membawahi beberapa Redaktur lain. Di lini paling terakhir

tentunya terdapat wartawan dan fotografer atau pewarta foto yang menjadi ujung tombak dari harian tersebut. Berikut ini akan di ulas komposisi awak media *Republika* secara lebih rinci dan alur produksi berita yang berlaku di harian tersebut.

3.1. Komposisi Organisasi Harian *Republika*

Seperti halnya perusahaan surat kabar lain, organisasi harian *Republika* terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian perusahaan yang bertugas untuk mengembangkan aspek bisnis dari harian *Republika*, dan bagian redaksional yang bertanggung jawab dalam urusan pencarian, penulisan, dan penyajian pemberitaan.

3.1.1. Bagian Perusahaan

Komposisi bagian perusahaan *Republika*

a. Direktur Utama

Direktur utama dari harian *Republika* adalah General Manager atau pemimpin umum dari harian *Republika*. Idealnya direktur utama ini menjadi pengurus dari semua kegiatan media baik redaksional maupun bisnis serta menjadi penghubung antara pemilik media dan para pekerja media, akan tetapi dalam harian *Republika* direktur utama mereka tidaklah terlalu sering bersentuhan dengan bagian redaksional harian tersebut. Direktur utama *Republika*, Erick Thohir, lebih memandang *Republika* sebagai lahan bisnis yang telah memiliki pasarnya sendiri sehingga tidak perlu terlalu di

intervensi. Menariknya direktur utama dari *Republika* ini sendiri adalah salah satu pemilik dari harian *Republika* melalui Mahaka Media, sehingga dapat dikatakan bahwa ia menghubungkan secara langsung antara pemilik media dan awak media.

b. Wakil Direktur Utama

Sama seperti posisi direktur utama, posisi wakil direktur utama dari harian *Republika* diisi oleh salah satu pemilik dari harian ini sendiri, yaitu Daniel Wewengkang. Sebagai wakil direktur utama ia lebih banyak bertanggungjawab untuk menemani dan menggantikan posisi direktur utama apabila direktur utama sedang berhalangan. Selebihnya posisinya lebih bersifat formalitas untuk menegaskan kehadiran Mahaka Media dalam harian *Republika*.

c. Direktur Pemberitaan

Direktur Pemberitaan dalam harian *Republika* berperan sebagai penghubung antara para pemilik perusahaan, dalam hal ini Mahaka Media, dan para awak media terutama bagian redaksional. Posisi direktur pemberitaan ini sendiri diisi oleh seorang mantan pemimpin redaksi *Republika*, yaitu Ikhwanul Kiram Mashuri. Dapat dikatakan posisi ini adalah posisi yang paling memahami urusan jurnalistik dalam bagian perusahaan.

d. Direktur Operasional

Direktur operasional dalam harian *Republika* bertugas memimpin jalannya operasional non-redaksional dalam harian tersebut seperti mengurus sirkulasi, percetakan, marketing, iklan, keuangan, HRD, dll.

e. Manajer Iklan

Sama seperti media lain manajer Iklan dalam harian *Republika* bertugas menerima dan mengatur spot iklan dalam harian *Republika*.

f. Manajer Produksi

Manajer produksi dalam harian *Republika* bertugas mengurus produksi atau percetakan dari surat kabar tersebut setiap harinya.

g. Manajer Sirkulasi

Manajer sirkulasi dalam harian *Republika* bertugas mengurus sirkulasi atau peredaran Koran tersebut ke berbagai agen, eceran, dan pelanggan di seluruh Indonesia.

h. Manajer Keuangan

Manajer keuangan bertugas permasalahan keuangan dalam harian tersebut, seperti pencatatan pemasukan, pengeluaran, penggajian karyawan, dll.

3.1.2. Bagian Redaksional

Komposisi redaksional Harian *Republika* mengacu pada struktur standar dari sebuah redaksional surat kabar. Komposisi ini secara rinci antara lain terdiri dari:

a. Pemimpin Redaksi

Seperti halnya surat kabar lain pemimpin redaksi di Harian *Republika* bertanggung jawab atas isi redaksional media. Ia memiliki kuasa untuk menentukan berita apa yang akan dimuat dalam harian tersebut. Pemimpin redaksi sendiri tidak langsung berurusan dengan operasional jurnalistik sehari-hari, dan hanya turun tangan saat menangani

pemberitaan yang krusial dan mendesak. Kegiatan redaksional sehari-hari lebih banyak ditangani oleh redaktur pelaksana. Pemimpin redaksi *Republika* saat penelitian ini disusun adalah Nasihin Masha.

b. Wakil Pemimpin Redaksi

Sama seperti media lain, wakil pemimpin redaksi dalam harian *Republika* bertugas menggantikan peran pemimpin redaksi saat pemimpin redaksi berhalangan. Akan tetapi wakil pemimpin redaksi juga aktif dalam setiap kegiatan pengawasan redaksional serta hadir dan memiliki suara dalam rapat-rapat redaksional. Wakil pemimpin redaksi saat penelitian ini disusun adalah Arys Hilman Nugraha.

c. Redaktur Pelaksana

Redaktur pelaksana dalam harian *Republika* bertugas menjalankan operasional ruang redaksi setiap harinya. Ia menerima setiap pemberitaan dari redaktur dan turut menentukan berita apa saja yang akan dimuat oleh harian tersebut melalui rapat perencanaan. Posisi redaktur pelaksana saat penelitian ini disusun diisi oleh Elba Damhuri.

d. Kepala *newsroom*

Kepala *newsroom* bertugas memimpin atau mengontrol jalannya produksi berita dalam *newsroom*. Apabila tanggung jawab redaktur pelaksana lebih bersifat umum pada jalannya media sehari-hari, maka kepala *newsroom* bertanggung jawab hanya pada saat-saat berita diproduksi dalam *newsroom*. Kepala *newsroom* *Republika* saat ini adalah M Irwan Ariefyanto.

e. Kepala *Republika* Online

Kepala *Republika* online bertugas memimpin website www.Republika.co.id. Ia berperan dalam memilih pemberitaan, foto, serta desain layout yang akan dimuat dalam situs tersebut. Kepala *Republika* Online saat ini adalah Agung Pragitya Vazza.

f. Redaktur Senior

Redaktur senior adalah redaktur *Republika* yang dianggap telah berpengalaman dan diproyeksikan untuk diangkat menjadi asisten redaktur pelaksana. Tugasnya sama seperti redaktur lain yaitu melakukan editing pada berita yang masuk pada bidang mereka masing-masing. Redaktur senior *Republika* saat ini adalah Anif Punto Utomo.

g. Wakil Redaktur Pelaksana

Bertugas menggantikan tugas-tugas redaktur pelaksana saat redaktur pelaksana berhalangan serta mendampingi dan membantu redaktur pelaksana dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Saat ini wakil direktur pelaksana dari harian *Republika* adalah Irfan Junaidi, Syahrudin el-Fikri, dan Kumara Dewatasari.

h. Asisten Redaktur Pelaksana

Asisten redaktur pelaksana bertugas membantu redaktur pelaksana menjalankan tugas sehari-hari produksi berita. Asisten redaktur pelaksana *Republika* saat ini adalah Bidramnanta, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, dan Subroto.

i. Reporter Senior

Reporter senior adalah posisi yang cukup unik dalam *Republika*, dimana posisi ini tidak mengacu pada jabatan tertentu dengan tugas yang khusus, namun lebih pada titel yang diberikan pada seorang jurnalis senior dalam *Republika* yang tetap ingin menulis dan menjadi wartawan. Bahkan menurut pengakuan awak *Republika* ada reporter senior yang merupakan mantan wakil pimpinan redaksi *Republika* sendiri. Reporter senior *Republika* saat ini adalah Andi Nur Aminah, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, dan Teguh Setiawan.

j. Staf Redaksi

Staf redaksi dalam *Republika* adalah para redaktur yang bertugas menerima berita dari wartawan di lapangan dan mengeditnya dalam *newsroom*. Staff redaksi ini dibagi menjadi beberapa redaktur bidang. Staff redaksi ini adalah tulang punggung produksi berita saat berita telah sampai di kantor pusat Jakarta.

k. Kepala *Quality Control* dan Bahasa

Kepala *quality control* dan bahasa bertugas melakukan pengecekan akhir pada berbagai teks berita yang akan dimuat. Ia melakukan pemeriksaan pada kesalahan penulisan, bahasa, dan aspek teknis penulisan lain. Kepala *quality control* dan bahasa harian *Republika* saat penelitian dilakukan adalah Rakhmat Hadi Sucipto.

l. Kepala Desain

Kepala desain bertugas menyusun desain layout berita dan foto berita pada halaman Koran. Posisi kepala desain ini diisi oleh Sarjono.

m. Sekretaris Redaksi

Sekretaris redaksi bertugas menerima listing berita dari redaktur untuk kemudian disusun sebagai daftar berita. Daftar ini kemudian akan dirapatkan setiap harinya untuk dipilih mana berita yang layak dimuat dan mana yang tidak. Sekretaris redaksi *Republika* saat ini adalah Fachrul Ratzi.

n. Koordinator liputan

Koordinator liputan dalam *Republika* bertugas mengkoordinir rencana *follow up* berita atau peliputan berita yang akan dilaksanakan. Koordinator liputan ini sendiri bertugas dalam *news room* di kantor pusat.

o. Wartawan/Reporter

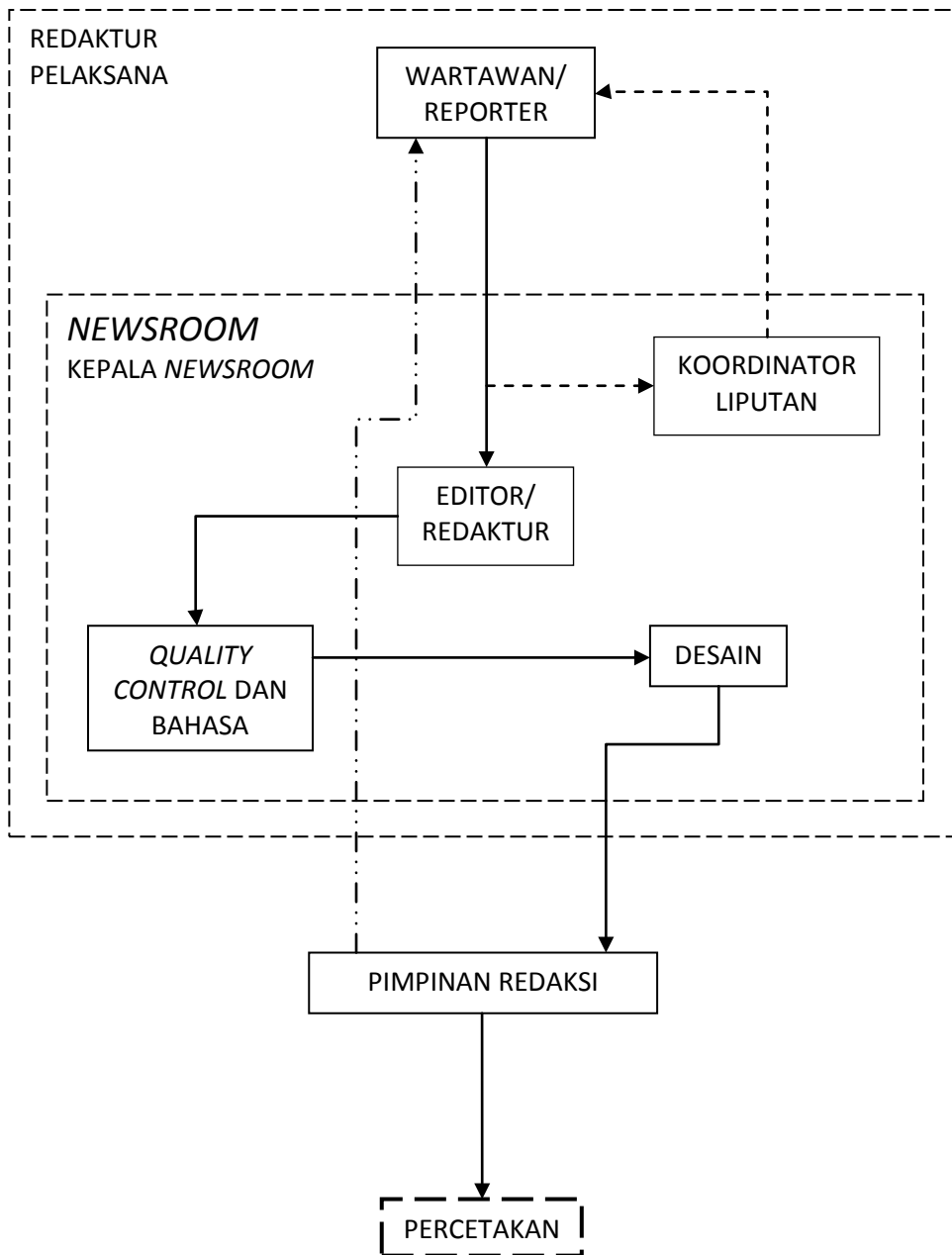
Wartawan atau reporter adalah ujung tanduk harian *Republika*. Mereka bertugas mencari, menulis, dan mengirimkan berita pada redaktur bidang mereka masing-masing di *newsroom*. Mereka tersebar tidak hanya di Jakarta, namun juga seluruh Indonesia. Posisi reporter ini juga merupakan jenjang karir paling awal dalam *Republika*. Umumnya pada awal karir mereka akan di “lempar” di daerah selama beberapa tahun. Setelah itu mereka akan ditarik menjadi reporter di Jakarta. Setelah di Jakarta inilah jenjang karir mereka akan semakin meningkat.

3.2. Alur Produksi Berita Harian *Republika*

Alur produksi berita pada harian *Republika* secara umum berjalan seperti media lain, dimana wartawan akan mencari dan menuliskan berita untuk kemudian diberikan pada redaktur atau editor yang bertanggung jawab di *newsroom*. Setelah diedit berita dirapatkan untuk ditentukan mana yang layak untuk dimuat, mana yang tidak, mana yang menjadi berita utama, dan dimana letak-letak berita lainnya. Setelah berita yang akan dimuat disepakati, dilakukan pengecekan pada bagian *quality control* dan bahasa lalu pada bagian desain. Setelah seluruh layout berita selesai disusun Pimpinan Redaksi akan melihatnya terlebih dahulu, apabila ada yang mesti ditambahkan berita akan diberikan lagi pada wartawan untuk ditindaklanjuti, apabila diterima layout koran akan dibawa langsung ke percetakan.

Gambar 6

Diagram Alur Produksi Berita Harian *Republika*



Keterangan:

- > Alur Berita
- - - - -> Alur Koordinasi Berita
- · - · - ·> *Feedback* dari Pimpinan Redaksi

3.2.1. Tahap Wartawan/Reporter

Tahapan filter pertama ini adalah tahapan yang sangat penting, bahkan menurut Chibnall tahapan jurnalis-sumber ini menjadi tahap yang paling penting dalam arena *gatekeeping*. Menurutny saat copy berita mencapai editor keputusan *gatekeeping* yang paling penting telah dilakukan. Peristiwa telah berlangsung, mereka telah mengalaminya, pengalaman tersebut telah dikonstruksi untuk audiens tertentu, konstruksi ini telah di tata sedemikian rupa dan diubah menjadi cerita berita penuh. Pada berbagai tahapan, pemrosesan dan seleksi telah berlangsung. (Chibnall dalam Shoemaker, 1991: 15).

Bercermin pada pendapat Chibnall tersebut dapat dikatakan bahwa wartawan *Republika* juga memiliki skala yang cukup besar dalam proses *gatekeeping*. Seorang reporter *Republika*, Setyo Bowo Pribadi, mengemukakan bahwa mereka tidak terlalu dibatasi dalam mencari berita, terutama berita politik. Saat disinggung mengenai kasus Istri Boediono ia mengatakan:

“... kita memang berpegangannya pada kaidah dan norma jurnalistik kita, apapun, setiap informasi itukan layak kita tindak lanjuti ya, misalnya kita nemu apa menemukan informasi seperti itu ya tetep kita tindak lanjuti, perkara nanti endingnya apakah ini jadi campur politik atau apa (agama) itukan, pada artinya akan akan juga terungkap juga, tapi di disatu sisi kita juga tidak akan, apa istilahnya nutup-nutupi ah istrinya pak ini (Boediono)”

Setyo disini mengatakan bahwa sebagai wartawan *Republika* mereka hanya berpegang pada kaidah-kaidah jurnalistik yang normatif. Tidak ada arahan khusus mengenai bagaimana cara meliput isu-isu yang menyerempet ke arah SARA. Kaidah jurnalisme umum nampaknya dianggap telah cukup untuk memandu wartawan dalam menulis pemberitaan yang bijak, terutama saat menyerempet

pada isu-isu SARA. Lebih lanjut, saat ditanyakan mengenai bagaimana meliput isu SARA ia mengatakan:

“Diisukan ini-ini, ya tetep secara proporsional kita kita kita pelajari kita apa, kita pahami, dan kita akhirnya pada akhirnya walaupun itu mesti harus jadi sebuah produk berita ya, tetep kita laksanakan. Artinya apa? Ketika ada sumber ini, inikan nikan akhirnya ada satu sumber ini, inikan pasti akan berkaitan dengan banyak hal, dari, dari, katakanlah dari pola, pola kebijakan kita menganalisis atau menggali sebuah informasi seperti apa nanti akan akhirnya akan terungkap juga kan, kita tidak bisa menjustifikasi oo istrinya ini nggak, tapi dengan ini lho, faktanya ini, ini faktanya ini, informasinya ini tapi ini faktanya ini ini ini kaya gini, akhirnya yang menilaikan masyarakat sendiri”

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada arahan untuk menutupi berita-berita berunsur SARA. Wartawan *Republika* dituntut untuk tetap meletakkan peristiwa itu secara proporsional dan menulisnya sebagai produk berita. Mereka menyerahkan kepada masyarakat mengenai penilaian atau akibat yang mungkin muncul dari pemberitaan tersebut. Ini artinya baik buruknya dampak pemberitaan mereka tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab redaksi, penilaian masyarakat sendiri juga akan ikut menentukan. Terkait isu terorisme misalnya, mereka tegas mengatakan untuk tetap memberitakannya.

“Sama halnya dengan media yang lain, kita pun juga mengemas berita terorisme sama seperti yang lain tidak ada yang ditutup-tutupi, karena pada prinsipnya ketika apa... ketika, itu peristiwa terjadi karena apa karena apa disitu memang muatannya memang terorisme ya kita berprinsip itu layak diketahui oleh khalayak”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada isu-isu yang dinilai sensitif untuk umat Islam, *Republika* tetap mewajibkan wartawannya untuk meliput pemberitaan tersebut selama berita itu memang layak diketahui oleh khalayak. Akan tetapi terkait isu semacam ini mereka juga memiliki arahan yang menarik. Mereka

diminta untuk tidak memperkeruh suasana dan mengadu domba antar umat Islam.

Di sini Setyo mengatakan:

“Kalo arahan khusus tidak ada, tapi memang dalam banyak hal kita dapet satu patokan bahwa kita ini Koran umat, apapun sekecil apapun kalo kita menyajikan berita jangan sampe membentrok antarumat atau membentrok internal umat kita sendiri. Pola-pola seperti memang kelihatannya.., pokoknya punya prinsip kaya gini, kita ini Koran umat, apapun yang bersinggungan dengan apa katakanlah dengan soal agama, ya sebagaimana mungkin kita harus bisa menjaga apapun yang akan kita sajikan ke masyarakat tidak memiliki dampak baik internal maupun antar sesame”

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa terkait isu-isu agama yang memiliki kecenderungan membenturkan antar umat Islam, wartawan *Republika* diminta untuk berhati-hati dan tidak semakin membenturkan umat yang ada. Hal inilah yang mungkin membuat *Republika* banyak dinilai lembut dan berhati-hati dalam memberitakan isu-isu terorisme dan kerusuhan. Hal ini jugalah yang membuat *Republika* terkesan sangat berhati-hati dalam memberitakan isu Istri Boediono, karena isu tersebut memiliki kecenderungan yang membenturkan umat Islam. Di lain pihak *Republika* terkesan sangat bombastis saat memberitakan isu Ekonomi Syariah, karena isu ini tidak membenturkan umat dan malah cenderung menyatukannya.

3.2.2. Tahap Editor/Redaktur

Setelah berita disusun oleh wartawan mereka mengirimkan copy berita tersebut pada redaktur atau editor yang bertanggung jawab. Seperti media lain editor dalam harian *Republika* ini bertugas sebagai penyelia yang mengontrol naskah berita yang masuk dari wartawan. Mereka melakukan pengecekan keabsahan

informasi, ejaan nama dan akurasi keterangan lain, serta membuat headlines. Selain melakukan koreksi mereka juga berhak menolak atau mengembalikan berita pada wartawan mereka apabila berita yang mereka terima dinilai tidak kredibel, kurang atau tidak memiliki nilai berita, atau tidak sesuai dengan pasar umat Muslim dari *Republika*. Selain itu memperkirakan tata letak dan menyesuaikan berita dengan ruang yang tersedia dalam halaman koran mereka.

Secara umum editor atau redaktur *Republika* memang dituntut untuk menyeleksi berita sesuai dengan identitas *Republika* sebagai Koran umat Islam. Ini bukan berarti bahwa mereka sama sekali tidak memberitakan isu-isu yang tidak menyinggung umat Islam, mereka hanya memberikan porsi dan highlight yang lebih besar pada peristiwa atau isu yang bersentuhan dengan umat Islam. Ini menjawab pertanyaan mengapa berita-berita kebijakan syariah dan Islam seperti berita ekonomi syariah pada masa kampanye menjadi penting untuk dimuat.

Sementara itu *Republika* juga memiliki kebijakan tertentu mengenai pemilihan frasa dalam berita, terutama apabila berita tersebut bersinggungan dengan umat Islam. Hal yang paling terlihat adalah bagaimana frasa-frasa yang mereka gunakan jangan sampai memojokkan umat Islam sendiri. Mereka mencontohkan dalam kasus Palestina, dimana dalam berita mereka para militan Palestina selalu disebut dalam konotasi positif seperti pejuang, gerilyawan, dll. Arys Hilman sendiri mengatakan:

“Oh iya, ya itu kebijakan, itu saya rasa bukan, kalau itu bukan dominasi kita juga, media Indonesia media massa di Indonesia saya rasa menurunkan hal yang sama dalam kasus hal inilah pejuang saya lihat juga dipakai media-media lain, tapi betul itu kebijakan kita”

Kebijakan semacam ini tidak hanya ditujukan bagi kasus Palestina dan isu konflik lain, tidak juga hanya mengacu untuk menyebut umat Islam, namun juga pada pemilihan frasa-frasa lain yang membuat posisi umat Islam menjadi lebih favourable. Pada kasus ekonomi syariah misalnya, sistem ekonomi tersebut disebut secara ilmiah sebagai sistem ekonomi non-derivatif dengan berbagai keunggulannya sehingga menghasilkan kesan yang favourable bagi sistem ekonomi syariah secara khusus dan umat Islam secara umum.

Sementara itu ketika disinggung bagaimana redaksinya dapat mempertahankan keberimbangan dengan tetap mempertahankan identitas ke-Islaman, mereka tegas menjawab bahwa selama ini mereka telah menerapkan prinsip-prinsip keberimbangan dengan baik dengan selalu adanya cover both side, cek dan ricek, berhati-hati dalam menggunakan sumber yang anonym, dll. Bahkan keberimbangan ini mereka tunjukkan dengan penghargaan yang mereka terima sebagai Koran Terbaik Versi Dewan Pers. Secara lebih rinci Arys Hilman mengatakan:

“jadi yang namanya cover both side, cek dan ricek itu nilai-nilai jurnalistik yang memang selalu kita terapkan selama ini, kalau misalkan belum dapat konfirmasi maka sebuah berita tidak kita turunkan, kita juga sangat hati-hati menggunakan narasumber anonym, kalau tidak kompeten jelas tidak akan kita pakai, kita tidak sembarangan menggunakan istilah menurut sumber, tidak kita jarang lakukan itum kita lebih suka menggunakan sumber yang terang karena lebih bisa dipertanggung jawabkan.”

Berikutnya ketika disinggung bagaimana redaksional mereka menyikapi pemberitaan yang memiliki potensi memecah umat, mereka menjawab dengan jawaban yang hampir serupa diberikan oleh wartawan mereka. Umumnya mereka mengatakan bahwa *Republika* adalah harian umat Islam Indonesia sehingga

mereka selalu berusaha untuk berdiri ditengah-tengah umat Islam. Akan tetapi mereka juga mengasosiasikan diri mereka sebagai Islam mainstream yang sepaham dengan demokrasi dan menolak model Islam yang terlalu radikal dan terlalu liberal. Mereka mengatakan:

“Ya kita memang mencoba berdiri di tengah, terkadang memang yang satu sini menekan, tapi kan kita punya pilihan, tidak selalu, kita akan pertimbangan. kalau tekanan yang sifatnya emosional kan nggak bisa, walaupun kita mencoba berdiri pada titik mainstream kan tetap ada, dan mereka Islam juga”

Implikasi dari “sifat” mainstream ke Islaman *Republika* ini adalah gencarnya pemberitaan mereka dalam politik dimana selama masa kampanye mereka bahkan membuat kolom dua halaman tersendiri yang berjudul “Koran Pemilu”. Sesuai dengan pandangan Islam mainstream moderat di Indonesia mereka berpandangan bahwa politik dan demokrasi tidaklah bertentangan dengan Islam, sehingga mereka mendorong umat Islam untuk lebih aktif berpolitik secara arif untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

Terakhir, bagaimana para editor/redaktur menjalankan tugasnya ini juga diakui dipengaruhi oleh pandangan ke-Islaman para individu pekerja media tersebut. Mereka mengakui bahwa para pekerja tersebut kebanyakan memiliki latar belakang ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Spirit moderat, profesional, dan modern dalam Islam mainstream inilah yang kemudian mempengaruhi redaksional pekerja media *Republika*. Mereka mengatakan:

“Dari dalam diri Republika, hal seperti itu kan akhirnya terinternalisasi pada dalam diri awak-awak Republika ... ketika saya bilang terinternalisasi kita tidak melihat batas itu lagi, terinternalisasi artinya ada direporter pikiran itu, ada di redaktur, ada diatasan”

3.2.3. Tahap Pengecekan Akhir

Setelah seluruh susunan berita disepakati oleh para redaktur, berita akan dibawa pada tim *quality control* dan bahasa untuk dikoreksi kesalahan-kesalahan penulisan yang ada. Setelah itu berita dibawa pada tim desain untuk disempurnakan tata letaknya pada halaman Koran. Setelah semuanya selesai dilakukan pengecekan ulang oleh tim *quality control* dan editor/redaktur. Setelah semua koreksi dan tambahan diberikan berita kembali dipegang oleh tim desain dan dipersiapkan untuk segera dicetak.

Pada tahapan ini relatif tidak ada kegiatan *gatekeeping* yang menuntut hadirnya kebijakan redaksional. Tahapan seleksi dan konstruksi berita umumnya telah final dilakukan pada tahapan sebelumnya, sehingga pada tahapan ini praktis hanya terjadi koreksi penulisan, tata letak, gambar, dan teknis redaksional lainnya.

3.2.4. Pimpinan Redaksi

Pada tahapan ini seluruh layout koran telah siap untuk dibawa ke percetakan, akan tetapi sebelum dibawa kesana pemimpin redaksi akan terlebih dahulu melihat seluruh layout tersebut. Pemimpin redaksi ini memiliki kuasa untuk menentukan apakah seluruh susunan koran telah layak untuk dicetak. Ia dapat menolak beberapa berita untuk diterbitkan atau meminta koreksi dan penambahan terhadap berita tersebut. Apabila ini yang terjadi maka pemimpin redaksi akan memanggil wartawan yang bersangkutan dan memintanya untuk menindaklanjuti keinginan pemimpin redaksi tersebut. Kekuasaan inilah yang menempatkan pemimpin

redaksi menjadi salah satu penentu arah kebijakan yang besar, walau ia sendiri sebenarnya menerima komposisi berita yang telah final. Dalam melaksanakan tugasnya ini pemimpin redaksi tentu tidak sendiri, ia ditemani oleh wakilnya dan redaktur-redaktur senior lainnya yang memiliki suara besar dalam memberikan masukan bagi pemimpin redaksi tersebut.

Tidak seperti pada hari-hari biasa, pada masa kampanye kepresidenan 2009 seluruh siklus ini menjadi sangat penting karena banyak menyangkut isu-isu besar. Kebanyakan isu-isu yang dipilih sebagai berita utama pada masa itu memang isu-isu seputar kampanye presiden. Setidaknya hanya peristiwa kematian Michael Jackson saja yang sempat menggeser berita-berita kampanye sebagai berita utama. Menariknya peristiwa yang dipilih untuk di *follow-up* dan kemudian diberitakan kebanyakan adalah peristiwa kampanye yang berhubungan dengan umat Islam, seperti kunjungan pasangan calon tertentu ke sebuah pesantren atau dukungan kelompok Islam tertentu pada suatu pasangan calon. Arys Hilman selaku wakil pimpinan redaksi mengatakan bahwa isu-isu ini dipilih karena *proximity* atau kedekatan peristiwa tersebut dengan umat Islam Indonesia sebagai pasar dari *Republika*. Alasan kedekatan ini jugalah yang membuat wacana ekonomi syariah yang dibawakan Boediono saat berkunjung ke *Republika* dipilih sebagai berita utama. Mereka mengatakan:

“Itu kan proximity ya, kalau dalam jurnalistik pasti belajar, beda pendekatan pembaca Republika dengan pendekatan pembaca yang lain, kalau misalnya buat Koran lain, seorang, sekelompok masyarakat muslim di amerika latin itu mungkin tidak akan menarik, karena pembacanya juga tidak punya interest khusus terhadap masalah itu, tapi pembaca Republika sudah jelas, jadi ada kedekatan psikologis terhadap isu-isu yang terkait dengan umat islam. Jadi pembaca Republika, jadi kita mengambil nilai kedekatan itu proximity itu, kalau persoalan lain ngapain jauh jauh, secara

geografis kan jauh kan, bagi kita juga secara geografis jauh tapi secara psikologis kan dekat dengan pembaca kita, jadi kita bisa ambil itu sebagai, sama juga dengan isu syariah, bagi kita ini akan sangat menarik karena pemerintah kita punya concern khusus terhadap masalah Islamic banking, tapi buat yang lain mau ngapain ngomongin Islamic banking orang masih ekonomi konvensional itu aja mereka masih pakai. Kan sebenarnya itu nilai umum ya dalam jurnalistik, proximity itu”

Fenomena yang berbeda ditemui saat mereka menghadapi isu istri Boediono non-Muslim yang berkaitan dengan umat Islam juga. Mereka memang melakukan *follow-up* terhadap isu tersebut akan tetapi memilih untuk agak menjaga jarak dengan berhati-hati saat memberitakannya. Mereka juga tidak menempatkannya dalam porsi berita yang besar meskipun saat itu isunya sangat gencar diberitakan dalam media massa. Arys Hilman sendiri dengan tegas mengatakan bahwa *Republika* tidak bermain di isu tersebut dan bahkan menganggapnya sebagai bukan isu. Ia mengatakan

“Karena itu lebih pada permainan politik, kalau mau main di substansi aja, ya karena itu lebih, suasana ya kita harus baca suasana saat itu, itu untuk mengajar, isu itu untuk mengajar, kalau Republika sih kalau mau main bersih ya main yang baik lah yang bersih lah, suasana waktu itu menggunakan isu itu untuk kepentingan yang tidak tulus, kalau tulus sih nggak papa, tapi masalahnya kita bisa baca ini bukan sesuatu yang humble, cara berpolitiknya adalah cara berpolitik yang menurut kita ya ini ingin menjatuhkan saja bukan sekadar ingin membahas, kalau mau kita bahas secara serius masalah tersebut dalam diskusi yang benar, bagaimana kalau seorang istri wakil presiden itu non islam, ayo kita diskusikan, tapi bukan memanfaatkan isu itu untuk kepentingan tadi menjatuhkan, itu kita nggak ikut”

Kemudian saat ditanya mengenai isu jilbabisasi politik mereka juga menganggapnya seirama dengan isu sebelumnya yang tidak tulus, sarat kepentingan, dan sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan berita. Terhadap kedua isu ini mereka memilih untuk memberitakannya secara sepiantas tanpa ada *highlight* tertentu didalamnya. Arys Hilman mengatakan:

“Tidak harus di highlight? Tidak harus di sebut nama? Mungkin kita ada ya tapi juga mungkin sepintas-pintas, sama seperti tadi masalah..., pokoknya liat dulu deh niatnya, karena suasana politik mungkin tidak akan terbentuk saat ini, ketika tesis ini dibikin mungkin suasana 2009-nya tidak terbaca, tapi kalau kita yang mengalami tahun 2009 bisa kelihatan, mana statement yang humble mana yang pura-pura, itu kalau 2009 kebaca”

“Ya kita mencoba bermain dalam politik yang bener pada waktu itu, ya artinya kita membaca situasi politik itu dari sudut kebenarannya aja, jadi jangan, kebenaran substansial aja jangan terbawa pada isu-isu sampingan, banyak kok pada waktu itu isu-isu utamanya ngapain juga, misalnya keberpihakan ekonomi, itu jelas sekali, mungkin kritik terhadap pak Boediono waktu itu adalah yang lebih substansial waktu itu adalah keberpihakan ekonomi itu”

4. Pandangan Islam Mengenai Politik

Dunia Islam dan Katolik mengalami pergumulan sejarah yang berbeda. Selama berabad-abad mayoritas kaum muslim dan Kristen telah hidup sebagai komunitas besar di bawah pemerintahan yang setidaknya-tidaknya secara nominal memiliki agama yang sama. Akan tetapi agama Kristen dan Islam berawal dari lingkungan politik yang nyaris sangat berseberangan. Agama Kristen awal adalah kelompok minoritas yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat yang lebih besar untuk hidup sambil secara berhati-hati menolak untuk terlibat dalam politik. Usaha ini jelas terlihat dari pernyataan Yesus sendiri, *“memberikan kepada Kaisar¹⁹ apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan”* (Matius 22: 21).

¹⁹ Romawi dan kaisarnya pada masa itu belumlah mengadopsi Kristen sebagai agama negara dan masih menyembah dewa-dewa (paganism). Oleh karena itu konteks kalimat Yesus tersebut menjelaskan relasi politik antara kelompok minoritas Kristen yang kecil namun menjadi umat pilihan dengan masyarakat luas (Romawi) yang besar dan berkuasa namun pagan.

Kalimat Yesus ini secara penuh digunakan untuk merujuk pada pemisahan antara agama dan negara secara penuh. Kristen Barat yang berkompromi dengan dunia politik mengalami keadaan sebagai berikut: agama Kristen berkembang dari sebuah komunitas buruh menjadi agama resmi di Kekaisaran Roma. Tetapi, pemerintahan gereja dan pola kepemimpinan gereja yang telah secara efektif terlembagakan sebelum Roma memeluk agama Kristen, tidak kehilangan eksistensinya. Sebaliknya gereja dan negara hidup secara berdampingan. Baik gereja maupun negara menuntut dukungan dunia lain, keduanya menuntut otoritas keduniaan ini dan tak pernah secara penuh mendominasi pihak lain (Brown, 2000: 68).

Konsepsi ini memuluskan proses sekulerisasi masyarakat barat dan bahkan agama Kristen itu sendiri yang sejak era renaissance menuntut kebebasan yang lebih besar dari agama. Akan tetapi proses ini juga menimbulkan kelompok-kelompok kecil yang selalu tampil menolak dan fanatik karena proses kompromi agama, yang oleh Max Webber di sebut sebagai rutinisasi karisma (Webber dalam Brown, 2000: 68), selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan. Kelompok-kelompok penentang ini tetap memegang pemisahan antara agama dan negara akan tetapi mereka menentang pemerintahan yang tidak sesuai dengan standar bible. Di seluruh dunia kelompok-kelompok ini muncul memisahkan diri dari katolik dan kekristenan yang lebih umum dengan mendirikan aliran, denominasi, atau gerakan keagamaan baru. Salah satu gerakan keagamaan yang mencerminkan

pola ini adalah gerakan Evangelicalisme²⁰ di barat yang oleh *Michael Luo* di kelompokkan sebagai fundamentalis (Michael Luo. (2006). Dalam http://www.nytimes.com/2006/04/16/weekinreview/16luo.html?_r=1&adxnlnx=145227368-p%20hJwvCXS0qceSTw%20jLi8w&pagewanted=all. Diunduh pada tanggal 24 Mei 2011 pukul 12:47 WIB).

Berdasarkan ulasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada dua kelompok dalam lingkungan Kristiani yang berbeda dalam memandang hubungan antara negara dengan agama, antara lain:

- a. Kelompok sekuler yang saat ini menjadi mayoritas dan dominan di hampir seluruh komunitas Kristen dunia termasuk Indonesia
- b. Kelompok fundamentalis yang sangat minoritas dan terpecah kedalam berbagai aliran seperti gerakan Evangelicalisme

Kaum Muslim sementara itu berkembang dalam lingkungan yang berbeda sehingga menghasilkan masyarakat yang juga berbeda. Muhammad sejak hijrahnya ke Madinah telah memimpin tidak hanya sebuah komunitas agama, namun juga negara yang kemudian berkembang dengan pesat di bawah kepemimpinan para khalifah sesudahnya. Tidak ada badan keagamaan seperti Gereja karena komunitas Muslim baru ini memandang agama dan politik sebagai sebuah jaringan tanpa perekat dan sebuah satu kesatuan. Persepsi ini dengan baik diungkapkan dalam hadis nabi, "*Bekerjalah untuk dunia ini seolah-olah kamu*

²⁰ Evangelicalisme adalah gerakan keagamaan Kristen yang lahir di Inggris pada tahun 1730an dan mendapat popularitas di Amerika Serikat pada sekitar abad ke-18 dan 19. Menurut David Bebbington ada empat karakteristik dari gerakan ini, yaitu conversionisme, keyakinan bahwa kehidupan manusia musti diubah; activism, keyakinan bahwa pesan-pesan Yesus (gospel) harus di ekspresikan dalam usaha; Biblicism, penghargaan pada Bible; dan crucicentrism, penekanan pada pengorbanan Yesus saat di salib (Bebbington, 1989: 2-3)

akan hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok” (HR. Ibnu Asaakir).

Pada masa masa awal dan masa di mana Kekhalifahan masih berdiri²¹ konsepsi ini dapat dengan mudah dijalankan karena para pemimpin dunia Islam pada masa itu menerapkan syariah, yang tidak terpisahkan dari dunia, sebagai hukum resmi kenegaraan. Konsepsi ini baru menemui masalah saat kaum Muslimin mulai terkolonialisasi oleh barat dan berinteraksi dengan sekulerisme barat. Kejatuhan kekhalifahan usmani dan pertumbuhan nasionalisme yang pesat di negeri-negeri Islam menjadi penanda awal bagi kejatuhan konsepsi tersebut. Pada masa itu kaum Muslimin harus berkompromi untuk mengatasi kemunduran mereka dan mencari jawabannya dengan modernisasi ala barat, termasuk mengadopsi sekulerisme. Pada awalnya kompromi ini tidak menemui masalah dan puluhan negara Islam sekuler pun lahir. Akan tetapi memasuki paska Perang Dunia II pertentangan-pertentangan pun mulai timbul, semuanya memandang bahwa system sekuler yang memisahkan agama dan negara tidak sesuai dengan Islam yang tidak memandang adanya perpisahan semacam itu.

Gejolak penolakan pertama muncul di Mesir pada masa yang lebih awal dengan didirikannya Al Ikhwan (Muslim Brotherhood) pada 1928 oleh Hassan al-Banna. Organisasi ini telah menyerukan untuk kembali pada syariah namun dalam skala tertentu masih menerima beberapa aspek sekularisme. Organisasi ini juga membuka pintu bagi lahirnya organisasi-organisasi islamis lain yang lebih keras

²¹ Pemerintahan pertama umat Islam didirikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah ia hijrah ke Madinah, akan tetapi istilah khalifah baru disematkan kepada penerusnya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq (Armstrong, 2001: 30). Kekhalifahan tersebut oleh dianggap terus berdiri hingga runtuhnya Kekhalifahan Usmani pada tahun 1924

seperti Hizb ut-Tahrir, Jamaat e-Islami, dan Al-Qaeda. Seluruh organisasi yang di sebut terakhir berideologi murni Islamisme dan seringkali menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka terlihat bahwa umat Islam, bahkan dalam aliran Sunni sekalipun, tidaklah terikat dalam satu kesatuan yang sama. Ada perbedaan-perbedaan prinsipil dalam internal umat Islam saat memandang idealisme politik. Ada Islam moderat yang diartikan sangat luas oleh beberapa akademisi. Professor Bedoui Abdelmajid mengartikannya sebagai tidak berlebihan *ghuluww* (ekstrim) dalam menjalankan agama²². Angel Rabasa sementara itu mengartikannya dengan lebih liberal sebagai Muslim yang mau menerima pluralisme, feminisme dan kesetaraan gender, demokratisasi, humanisme dan *civil society*²³. Bagi Muqtedar Khan, cendekiwan Muslim asal Canada moderat itu adalah yang berfikiran terbuka, kritis, menghormati semua orang, bermoral, beramar ma'ruf nahi munkar (QS 5:48; 3:110), tidak ada intimidasi dan kekerasan²⁴. Andrew McCarthy sementara itu malah tegas menyatakan siapapun yang membela syariah tidak dapat dikatakan moderat²⁵.

Perbedaan pengertian ini menunjukkan sulitnya memperoleh konsensus mengenai kategorisasi kelompok Islam, bahkan definisi moderat pun masih sangat bervariasi dan sering tertimpa dengan kategori liberal. Kelompok liberal sendiri

²² Zarkasyi, Hamid Fahmi. (2011). *Moderat*. Dalam http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=249:moderat&catid=2:hamid-fahmy-zarkasyi. Diunduh pada tanggal 24 Mei 2011 pukul 13:50 WIB

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ McCarthy, Andrew C. (2010). *Inventing Moderate Islam*. Dalam <http://www.nationalreview.com/articles/244545/inventing-moderate-islam-andrew-c-mccarthy?page=2>. Diunduh pada tanggal 24 Mei 2011 pukul 13:50 WIB

menurut Adian Husaini adalah Islam yang terlalu kontekstual, artinya cenderung menafsirkan Islam hanya untuk menjustifikasi konsep-konsep dalam konteks masyarakat Barat. Contohnya, di kalangan liberal ada yang menafikan hukum Tuhan (syariah), mempersoalkan otentisitas al-Qur'an, menyoal otoritas ulama agar kemudian dapat menghalalkan homoseks dan lesbi, nikah beda agama dsb²⁶. Jaringan Islam Liberal (JIL) melalui salah satu tokohnya, Lutfie Assyaukanie, sementara itu menyamakan Islam liberal sebagai istilah “kiri” dalam wacana pemikiran Barat modern yang progresif, pluralis, dan mengarah ke secular, menjadi liberal dengan demikian menjadi “kiri”, sedangkan menjadi konservatif juga akan menjadi “kanan” atau fundamentalis dalam sikap politik (Assyaukanie, Luthfie A. (2002). *Islam Liberal: Definisi dan Sikap*. Dalam <http://islamlib.com/id/artikel/islam-liberal-definisi-dan-sikap> diunduh pada tanggal 24 Mei 2001 pukul 14:09 WIB).

Kelompok Islam lain yang sering di sebut adalah kelompok fundamentalis atau radikal. Mujani sendiri lebih suka menggunakan istilah Islamisme untuk menyebut kelompok Islam radikal dan menganggap pandangan tersebut baru berkembang pada tingkatan sikap. Kelompok ini memiliki arkeologi jihad yang khas dan seringkali melihat dunia sebagai pertarungan antara hitam dan putih atau kafir yang diwakili oleh barat nasrani dan mu'minin yang diwakili oleh orang-orang Islam. Mereka bahkan melihat dunia di bagi sebagai *dar al-islam* (Wilayah Islam) yang damai dan *dar al-harb* (wilayah perang). (Esposito, 2002: 21).

²⁶ Zarkasyi, Hamid Fahmi. (2011). *Moderat*. Dalam http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=249:moderat&catid=2:hamid-fahmy-zarkasyi. Diunduh pada tanggal 24 Mei 2011 pukul 13:50 WIB

Melalui pengertian ini kelompok fundamentalis di anggap sebagai Islam yang sangat dikotomis dan tak dapat memandang dunia di luar Islam dengan damai.

Terkait dengan kategorisasi masyarakat Islam, Clifford Geertz juga pernah memberikan pengelompokan masyarakat Jawa yang sangat terkenal hingga kini. Kelompok tersebut antara lain adalah Priyayi, yaitu kelompok bangsawan Jawa; Abangan, Muslim yang tidak menjalankan agama mereka dan cenderung mengikuti adat istiadat; dan Santri, Muslim taat yang menjalankan agama mereka. Kategori Geertz menurut penelitian ini tidak lagi dapat digunakan, karena perubahan masyarakat Jawa itu sendiri. Kelompok Priyayi misalnya sudah sangat sedikit dan tidak lagi memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Kelompok santri juga sudah terpecah menjadi banyak kelompok lain seperti moderat dan fundamental. Turmudi sementara itu mengeluarkan kategorisasi Islam yang berbeda. Menurut mereka Islam di bagi tiga, yaitu Islam sekuler atau nisbi, Islam substansialis yang moderat, dan Islam skriptualis yang radikal (Turmudi dkk, 2005: 11). Kategorisasi ini secara khusus telah masuk ke unsur politik yang oleh Turmudi dkk dikatakan sebagai respon yang muncul dihadapkan dengan hegemoni politik atau negara. Akan tetapi kategorisasi ini tidak terlalu menjelaskan perbedaan-perbedaan dasar di antara ketiga kelompok tersebut dan lebih fokus mengulas konsep Islam fundamental.

Mengacu pada seluruh definisi tersebut, terutama kategorisasi dari Turmudi dkk, maka penelitian ini merumuskan sebuah kategori masyarakat Islam berdasarkan pandangan mereka mengenai politik, kekuasaan, dan yang terpenting hubungan Islam dengan negara. Kategorisasi inilah yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Kategorisasi masyarakat Islam tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kelompok Sekuler, kelompok ini memegang konsepsi barat bahwa negara dan agama harus sama sekali dipisahkan, hukum dalam agama tidak bisa serta merta dijadikan sebagai hukum negara. Kelompok sekuler cukup dominan dalam masyarakat Muslim saat ini, contoh dari kelompok ini adalah tokoh-tokoh yang tergabung dalam partai-partai Nasionalis, seperti PDIP, Golkar, Demokrat, dll.
- b. Kelompok Fundamentalis, kelompok ini memegang teguh Islamisme yang memandang bahwa Islam bukan hanya agama namun juga system politik di mana setiap hukum dalam Islam harus menjadi hukum negara. Kelompok ini minoritas namun memiliki suara dan aksi yang seringkali sensasional. Contoh dari kelompok ini adalah partai-partai transnasional seperti Hizbut Tahrir (HT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Islamiyah (JI), dan yang terbaru Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT).
- c. Selain kedua kelompok di atas masih ada juga kelompok moderat yang menerima keberadaan negara dan bahkan ikut berpolitik secara sekuler. Kelompok ini menuntut penerapan syariah yang lebih ketat dalam negara akan tetapi tidak menuntut perombakan dasar negara yang ada. Kelompok ini adalah mayoritas dalam masyarakat Indonesia yang mau hidup dalam sistem demokrasi namun enggan untuk di sebut sekuler.

Contoh dari kelompok ini adalah organisasi dan partai seperti PAN, PKB, PKS, HMI, dll.